



info indonesia

● TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 ●

MINGGU II AGUSTUS 2023

Harga @Rp 20.000,-



Road to
Election
2024



GIBRAN

PALING PAS DAMPINGI PRABOWO

JK YAKIN
ANIES
JADI
PRESIDEN

PERSAINGAN
POLITISI VS
MANTAN
KAPOLDA

HERMAN DERU
UTAMAKAN KELUARGA
TOLAK INSTRUKSI
SURYA PALOH

UNTUK PEMILU
PANGLIMA
BISA TUNDA
PENSIUN

JANGAN
SALAH PILIH
PEMIMPIN
YANG BENAR



“Apa yang disampaikan Pak JK itu menjadi sebuah pikiran dia untuk memperkuat barisan Koalisi Anies Baswedan, seandainya Golkar bisa masuk ke sana”

Ujang Komarudin

JK YAKIN ANIES JADI PRESIDEN

Elektabilitas calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, tercatat selalu berada di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menurut berbagai lembaga survei.

Survei dari Lembaga Utting Research Australia, 27 Juli 2023, misalnya, menempatkan Anies Baswedan di posisi tiga dengan suara 27 persen dibandingkan dengan Ganjar Pranowo 34 persen dan Prabowo Subianto 33 persen.

Sementara, dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), pada simulasi tiga nama capres, Anies hanya didukung 22,4 persen, tertinggal jauh dari Prabowo Subianto (40,5 persen) dan Ganjar Pranowo (30,8 persen).

Meski begitu, menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, perolehan elektabilitas yang dilakukan lembaga survei tidak selalu menggambarkan hasil kemenangan pada Pilpres 2024, tapi hanya menggambarkan dinamika tren yang sedang berkembang.

Dia lantas membandingkan elektabilitas Anies Baswedan dengan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat mencalonkan diri sebagai Presiden AS ke-45 pada Pemilihan Presiden 2016.

“Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut peneliti, tapi Trump terpilih. Dulu banyak hal-hal begitu,” ungkap JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu, elektabilitas Anies Baswedan sebelumnya juga pernah menempati posisi ketiga di antara kandidat Gubernur DKI Jakarta lainnya pada Pilkada 2017. Namun, pada akhirnya Anies keluar sebagai pemenang.

“Waktu di DKI juga Anies terendah kan, posisi tiga, tapi kemudian dia terpilih. Itu lebih kecil, kurang lebih tujuh juta pemilih diwakili 1.200 (responden). Apalagi 1.200 (responden) yang disurvei dengan jumlah pemilih 205 juta,” tuturnya.

Apa yang disampaikan JK tersebut mendapatkan persetujuan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Dia menyebutkan ada rasa perlawanan dan semangat dari Anies dan Koalisi Perubahan untuk mencapai kemenangan.

“Pak JK benar. Ada rasa perlawanan dan semangat perubahan dari Mas Anies dan KPP. Itu dirasakan nyata di masyarakat. Makan-

ya jumlah undecided voters-nya besar. In-sya Allah kuat Mas Anies,” ungkap Mardani, Selasa, 1 Agustus 2023.

Menurutnya, Donald Trump bisa menang karena adanya micro campaign melalui media sosial. Hal ini bisa dilakukan oleh Anies meskipun karakteristik demokrasi di Indonesia berbeda dengan AS.

“Beda. Tapi kunci kemenangan Donald Trump dengan micro campaign melalui sosmed. Mas Anies kuat di sosmed. Penetrasi sosmed Indonesia dan USA sebangun,” ujar Mardani.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, Jusuf Kalla masih berharap Partai Golkar mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebab, dukungan Golkar akan memperkuat poros yang sudah diisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS itu.

“Tapi ya apa yang disampaikan Pak JK ya itu menjadi sebuah pikiran dia ya untuk memperkuat barisan Koalisi Anies Baswedan, seandainya Golkar bisa masuk ke sana,” kata Ujang, Selasa, 1 Agustus 2023.

Kendati demikian, Golkar dinilai sulit merapat ke poros Anies. Konstruksi politik yang terbangun tak menyiratkan partai beringin itu akan ke Koalisi Perubahan.

“Dari konstruksi politik yang ada saya melihatnya Golkar berat mendukung masuk Koalisi perubahan untuk mendukung Anies,” kata Ujang.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada 2021. Pemeriksaan itu akan

mengindikasikan bahwa Airlangga diduga terkait dengan kasus itu.

Menurut Ujang, usai pemeriksaan itu justru makin memperlihatkan Golkar merapat ke poros pendukung Ganjar Pranowo dan ingin berkoalisi dengan PDIP. Sementara itu, bila Munaslub untuk mengganti Airlangga terjadi, arah dukungan Golkar diyakini ke Prabowo Subianto.

“Sejatinya Golkar arah dukungan untuk Ganjar Pranowo karena persoalan sandera politik terkait dengan persoalan kasus Airlangga di Kejaksaan itu dan tadi seandainya skema Munaslub ada, yang terjadi misalnya ke Prabowo,” beber Ujang.

NasDem Ingatkan Anies

Di sisi lain, Partai NasDem mengingatkan Anies Baswedan untuk tidak memilih cawapres karena hanya memiliki kendaraan politik. Anies diminta untuk memilih cawapres sesuai dengan tiga kriteria yang sudah ditetapkan dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan.

“Kalau kita baca piagam deklarasi Koalisi Perubahan di dalam poin tiga itu sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih cawapresnya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, Selasa, 1 Agustus 2023.

Ali menjelaskan, tiga kriteria cawapres yang telah ditentukan dalam piagam deklarasi yakni membantu proses kemenangan, dapat menjaga stabilitas koalisi, dan membangun proses pemerintahan.

han berjalan dengan efektif.

Pilihan cawapres sesuai dengan tiga kriteria, kata Ali, itu sangat penting bagi Koalisi Perubahan. Cawapres yang dipilih nantinya diharapkan dapat menggaet dukungan di wilayah di mana suara Anies Baswedan tidak maksimal.

“Ketika Anies sudah memilih si fulan untuk menjadi cawapres, maka Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah,” katanya.

Dia mengatakan, cawapres yang dipilih bukan hanya memiliki kendaraan politik, tetapi harus masuk dalam tiga kriteria yang ditetapkan pada piagam deklarasi Koalisi Perubahan.

“Seseorang dipilih sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbangannya Anies bisa maju saja,” katanya.

Dia mengingatkan, cawapres yang dipilih tidak boleh hanya yang dekat dengan partai politik tertentu. Dikhawatirkan, jika dalam proses kontestasi tidak terpilih akan menenggalkan barisan Koalisi.

“Maka itu pengingat terhadap komitmen koalisi, karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara. Tidak ada ketua kelasnya,” imbuhnya.

Maka dari itu, Anggota Komisi III DPR ini menegaskan bahwa Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan harus memberikan penjelasan kepada NasDem, PKS, dan Demokrat terkait cawapres pilihannya itu.

“Capres sekali lagi harus bisa menjelaskan kepada tiga parpol politik kenapa memilih, apakah karena bisa memenangkan kontestasi,” ujarnya.

Dia menyarankan agar Anies dalam waktu dengan membentuk tim pemenang dan memulai sosialisasi ke masyarakat. Sebab, ketika Anies ke suatu daerah hanya disambut oleh simpatisan Partai NasDem, tidak disambut oleh simpatisan PKS dan Demokrat.

“Yang kita mau, Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh tiga kader partai politik,” tandasnya.

Sependapat dengan Ahmad Ali, Deputi Strategis dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan A Harahap, mengatakan, Anies dalam memiliki cawapres harus berpatokan kriteria yang tertuang pada Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan. Anies sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan harus mematuhi ketentuan Piagam Deklarasi tersebut.

“Ya sebaiknya memang begitu. Harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Lima kriteria itu kan memang sudah disepakati saat penandatanganan piagam KPP,” katanya.

Dia meyakini bahwa Anies sudah mengantongi salah satu nama untuk dijadikan cawapres. Tentu, cawapres yang dipilih itu sudah sesuai dengan kriteria. Bahkan Anies juga menambahkan satu kriteria lagi untuk bakal cawapresnya yaitu memiliki rekam jejak yang baik. Selain itu, bersih dari kasus hukum. ●



“Sehingga dengan dikabulkannya judicial review tersebut, maka hampir dapat dipastikan pasangan Prabowo adalah Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024”

Fernando Emas



Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres

DEMI DEMOKRASI ATAU PUTRA JOKOWI

Bola panas usulan batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden 35 tahun tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi atau judicial review Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur batas minimal usia capres-cawapres tengah disidangkan di MK.

Uji materi ini diajukan oleh tiga pihak. Pertama, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah perseorangan dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023. Kedua, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dengan nomor perkara 51/PUU-XXI/2023. Ketiga, sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dengan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023.

DPR dan Pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang digelar MK, Selasa, 1 Agustus 2023. Baik DPR maupun pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai dan memutuskan nasib usulan perubahan batas minimal usia capres dan cawapres tersebut.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Habiburrokhman selaku perwakilan DPR saat menyampaikan keterangan di persidangan MK, memberikan sinyal bahwa parlemen menyetujui usulan perubahan batas minimum usia capres-

cawapres. Salah satu pertimbangannya, Indonesia tengah memasuki bonus demografi.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada rentang 2020 sampai dengan 2030, jumlah usia produktif meningkat mencapai dua kali lipat dari total jumlah usia penduduk Indonesia. Oleh karenanya, penduduk usia produktif ini kemudian hari dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional untuk menjadi pemimpin bangsa, termasuk sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Sementara keterangan dari pemerintah dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar-Lembaga dari Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong. Dia menuturkan, UUD 1945 tidak mengatur secara rinci kriteria batas minimum usia capres-cawapres.

UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Sehingga aturan yang demikian dapat saja berubah sesuai kebutuhan yang berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Hakim konstitusi, Saldi Isra, menilai, baik DPR maupun pemerintah sama-sama setuju aturan batas minimal usia capres-cawapres diubah. Karena itu, dia menyarankan agar aturan tersebut langsung saja diubah sendiri oleh DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang, tanpa perlu melibatkan MK.

Namun, Sadil juga mempertanyakan urgensi perubahan batas minimal usia capres-cawapres menjadi 35 tahun. Sebab pada Pemilu 2004 dan 2009, batas minimal usia capres-cawapres adalah 35 tahun, kemudian diubah dalam UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi 40 tahun. MK ingin mengetahui apa alasan DPR dan pemerintah dulu menaikkan batas minimum usia capres dan cawapres.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menuturkan, saat ini nasib gugatan uji materi batas minimal usia capres-cawapres ada di tangan MK.

“Tapi saya secara prinsip berharap semoga MK mengabulkan. Karena batas umur minimal 40 bisa maju Pilpres itu sebenarnya keputusan yang tidak mau fleksibel dan keputusan yang tidak mau ambil nuansa semangat zaman,” ujar Adi.

Sama seperti DPR dan sejumlah pemohon, menurut Adi, bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia harus menjadi pertimbangan untuk mengubah batas minimal usia pencalonan presiden. Apalagi kapasitas dan kompetensi seseorang untuk menjadi pemimpin tidak bisa diukur dengan seberapa tua usianya.

“Batas umur itu tidak ada kaitannya dengan kapasitas dan kompetensi seseorang. Banyak di negara-negara lain umur di bawah 40 tahun top, sudah hebat, dan bisa jadi pemimpin, bisa jadi menteri, bisa jadi perdana menteri,” katanya.

“Makanya, ketika Mahkamah Konstitusi soal ambang batas minimum itu dikabulkan saya kira itu rasional. Artinya sudah saatnya tokoh-tokoh muda menunjukkan kemampuan mumpuni,” sambungnya.

Jika usulan ini nantinya disetujui MK, maka diskursus yang berkembang di publik adalah terkait pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Sebab, putra sulung Presiden Jokowi itu untuk saat ini adalah sosok pemimpin muda yang digadang-gadang bisa maju di Pilpres 2024.

“Apalagi banyak kita lihat potensi duet antara Prabowo dan Gibran.

Itu akan mempengaruhi dinamika politik yang sedang berkembang belakangan ini. Tentu akan mengubah peta politik secara nasional,” ujarnya. Saat disinggung siapa yang paling diuntungkan jika usulan batas minimal usia capres-cawapres menjadi 35 tahun, Adi tak menampik nama Gibran menjadi salah satunya, selain juga sejumlah kepala daerah

yang saat ini berusia di bawah 40 tahun.

“Secara substansi judicial review ini kan bagus, karena pembatasan usia 40 tahun itu kan nggak relevan. Kita kehilangan nuansa yang seperti saya bilang tadi, memiliki anak-anak muda (potensial) yang tidak bisa jadi pemimpin,” kata Adi.

“Ya tidak bisa kita pungkiri kalau ini sangat memungkinkan Gibran relevan lagi soal kemungkinannya bisa maju di 2024. Tapi apakah judicial review itu memang diniatkan agar Gibran bisa maju menjadi cawapres? Ya hanya waktu yang akan bisa menjawab,” sambungnya.

Sementara terkait kapan keputusan tersebut bisa diterapkan merupakan kewenangan MK, seandainya uji materi diterima. Menurut Adi, bisa saja batasan minimal usia capres-cawapres itu diterapkan pada Pilpres 2024 ini, kendati tahapan pemilu sudah bergulir.

“Kalau putusan MK ini berlaku untuk 2024, ya memang seakan-akan ini ada potensi untuk memuluskan langkah Gibran maju di 2024. Apalagi Gibran menyatakan mau maju, ya tentu ini semakin menegaskan keyakinan itu,” katanya.

“Tapi kalau kemungkinan putusan MK mengabulkan soal ambang batas minimum calon pencapresan ini berlakunya setelah 2024, tentu karpetnya bukan untuk Gibran tapi bagi semua orang di negara ini,” ujarnya.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti terkait norma batas minimum usia capres dan cawapres. Dia mewanti-wanti agar pengajuan uji materi itu hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu. Padahal, seharusnya pengajuan itu dilakukan atas dasar ingin memajukan demokrasi.

“Dilakukan untuk kepentingan negara dan memajukan demokrasi di Indonesia secara khusus memberikan pemerataan peluang bagi generasi muda. Semoga saja tidak diajukan hanya untuk kepentingan seseorang dan ambisi sekelompok orang saja,” ungkapnya.

Dia berpendapat bahwa pengajuan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu akan disetujui oleh lembaga pimpinan Anwar Usman itu.

Dia berpendapat, melihat dari konstruksi pengajuan gugatan tersebut memang untuk kepentingan Gibran Rakabuming agar maju di Pilpres 2024. Apalagi, saat ini santer kabar beredar bahwa Wali Kota Surakarta itu agar menjadi cawapres Prabowo Subianto. Namun, umurnya belum memenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu.

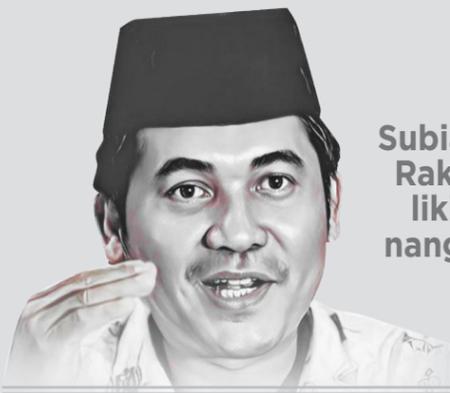
Oleh karena itu, dia menyangkan jika gugatan tersebut hanya untuk memberikan peluang kepada salah satu sosok demi bisa maju di Pilpres 2024, sehingga bukan untuk kepentingan memajukan demokrasi.

Menurutnya, kehadiran Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman seakan memberikan sinyal bahwa Parlemen mendukung penuh langkah gugatan tersebut.

“Sehingga dengan dikabulkannya judicial review tersebut maka hampir dapat dipastikan pasangan Prabowo adalah Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024,” imbuhnya.

Dia juga menilai bahwa tidak diumumkan cawapres pendamping Prabowo Subianto salah satunya karena masih menunggu keputusan MK. ●RDO





“Duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memiliki peluang kemenangan yang sangat besar”

Ray Rangkuti

GIBRAN PALING PAS DAMPINGI PRABOWO

Wacana menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming, makin kencang beredar. Apalagi, sejumlah pihak tengah menggugat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Salah satu yang mengusulkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid. Menurutnya, Gibran adalah figur anak muda yang mempunyai prospek politik baik dan disenangi generasi milenial. Ditambah lagi, mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 berusia di bawah 45 tahun.

Nusron mengatakan, nama Prabowo diusulkan sejumlah Ketua DPD I Golkar saat bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartato di Bali pada akhir pekan lalu. Nusron sendiri menyorkan nama Gibran untuk menjadi calon wakil presiden.

“Semua usulan dari manapun pasti akan dipertimbangkan. Namun keputusan tetap di tangan Ketum Partai Golkar. Kalau misal usulan DPD dan usulan saya dijahit dan diramu juga bagus, Prabowo-Gibran. Ini juga ideal,” ujar Nusron, Senin, 1 Agustus 2023.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memiliki peluang kemenangan yang sangat besar.

D i a

menilai, Gibran memiliki elektabilitas yang cukup bersaing dengan para kompetitornya. Hal itu akan sangat menguntungkan Prabowo Subianto.

Ray memprediksi, jika Prabowo Subianto berduet dengan Gibran, kemungkinan besar langkah mantan danjen kopasus itu akan semakin mudah merebut kursi RI-1. “Jika itu terjadi potensi Prabowo bakal melaju lebih kencang akan sangat terbuka,” kata Ray, Kamis, 3 Agustus 2023.

Dia mengatakan, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu juga akan terdongkrak jika berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi itu.

“Kalau soal elektabilitas ya cocok, Prabowo akan melonjak,” katanya.

Kendati begitu, dia mengatakan bahwa langkah pasangan tersebut juga harus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Jika Megawati tidak mengizinkan, duet tersebut akan sirna. PDIP akan tetap mendorong Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

“Tidak, mereka akan maju terus dengan Ganjar. Dan, itu sudah sepatutnya begitu (mendorong Ganjar),” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komardin, menyebut, Gibran Rakabuming

berpeluang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal ini terkait gugatan batas usia minimal capres dan cawapres di MK yang saat ini diajukan oleh PSI.

“Skenarionya itu kan Gibran jadi bakal cawapres. Jadi saya melihatnya kalau gugatan dikabulkan, peluangnya Gibran lebih besar (mendampingi) Prabowo Subianto, bukan kepada Ganjar,” kata Ujang, Jumat, 4 Agustus 2023.

Menurut dia, kecil kansnya jika Gibran berpasangan dengan bakal capres Ganjar Pranowo di pesta demokrasi nanti.

“Karena kalau ke PDIP, pasti Megawati enggak mau. Kan PDIP sendiri mengatakan Gibran itu anak ingusan, anak kemarin sore. Dari wali kota masa langsung menjadi (bakal) cawapres menggunakan nama bapaknya presiden. Enggak mau (PDIP), pasti itu,” katanya.

Selain tak mungkin dengan Ganjar, kata Ujang, sepertinya bila dijodohkan dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, juga tak mungkin.

“Yang memungkinkan itu dengan Prabowo, dengan Anies juga tidak mungkin,” katanya.

Ujang menambahkan, Presiden Jokowi diprediksi akan mengandalkan relawan dalam menerapkan strategi untuk Pilpres 2024. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, peluang Gibran dimajukan cawapres Prabowo akan didukung Jokowi, jika MK mengabulkan uji materiil aturan batas minimum usai capres-cawapres.

“Kalau Gibran jadi cawapresnya Prabowo, maka saya tidak suka relawan Jokowi lari ke Gibran,” kata Ujang.

Dia mengamati, dalam konteks pemilihan langsung, personal atau figur menjadi faktor penting dalam pilpres daripada partai politik. “Jadi saya melihat relawan-relawan ini lari ke Prabowo kalau bersama Gibran,” sambungnya.

Ujang meyakini, Jokowi tidak punya peranan penting di PDIP, sehingga usai pensiun menjadi

Presiden di 2024, dia tidak lagi punya kekuatan dalam mempengaruhi jalannya politik pemerintahan dalam negeri.

“Karena Jokowi tidak punya peran di PDIP, maka Jokowi cari cara lain untuk tetap bisa tetap kuat, bisa eksis, dan bisa aman setelah tidak menjadi presiden lagi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara, menilai, terdapat kenyamanan Gibran Rakabuming dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kenyamanan Gibran itu terlihat saat mendampingi Menteri Pertahanan tersebut berkunjung ke Solo beberapa waktu lalu.

“Kenapa Gibran itu lebih nyaman dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu dianggap lebih tegas melanjutkan Program Pak Jokowi,” kata Igor dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Agustus 2023.

Dia mengatakan Prabowo Subianto menjadi sosok capres potensial untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode berikutnya. Bahkan, Prabowo dalam beberapa kesempatan secara terang-terangan mengakui bahwa dia akan melanjutkan program dan kebijakan Presiden Jokowi. Salah satu yang akan dilanjutkan oleh capres dari Partai Gerindra itu adalah kebijakan hilirisasi.

Prabowo menambahkan Indonesia harus terus konsisten untuk melaksanakan hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi akan membuat Indonesia kaya karena produk yang diekspor tidak lagi hanya bahan mentah, tetapi sudah dalam bentuk jadi.

Selain itu, Prabowo juga meyakini kebijakan hilirisasi akan membuat ekonomi Indonesia kian mempesat. Menurutnya, ekonomi Indonesia bisa menjadi yang terbesar keempat di dunia pada 2045.

Melihat kesungguhan tekad tersebut, Igor mengatakan Prabowo merupakan figur yang layak memimpin Indonesia di masa depan. Tak hanya itu, hal ini makin dikuatkan dengan sinyal yang diberikan oleh Gibran yang berujar dia lebih cenderung akan berada di kubu Prabowo dibanding Anies Baswedan. Dan Gibran juga bilang Prabowo punya kapabilitas melanjutkan program dan kebijakan Presiden Jokowi.

“Jadi, dalam sebuah wawancara, Gibran mengatakan, saya itu paling mungkin berada di kubunya Prabowo, tetapi tidak Anies. Karena Prabowo itu punya potensi untuk melanjutkan kepemimpinan bapaknya,” terang Igor.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak risau bakal kalah persaingan dalam memperebutkan kursi cawapres Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming seiring ada uji materi soal batas minimal usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun.

PKB percaya diri nama yang mereka dorong, yakni Muhaimin Iskandar yang bakal dipilih Prabowo. “Ya kan kita fokus untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Jadi sudah itu saja fokusnya. Optimis 99,9 persen optimis,” kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid. ●



“Kita tidak bisa pungkiri, nama besar orang tuanya sangat berpengaruh untuk meraih kemenangan. Terutama nama Herman Deru sangat kuat tarikan elektoralnya”

Arianto



ANAK PEJABAT JADI CALEG UNJUK KEKUATAN DINASTI POLITIK

Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 menjadi pesta politik para elit partai, terutama anak-anak pejabat yang dinilai mempunyai privilese untuk menguasai kursi-kursi wakil rakyat.

Tahun politik di 2024 akan diramalkan dengan sosok-sosok baru para calon anggota legislatif yang membawa nama orang tuanya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal ini juga menjadi pembuktian kekuatan dan kekuasaan dinasti keluarga di tiap daerah di Indonesia.

Di Sumatera Selatan sudah tersiar kabar jika anak dan menantu Gubernur Herman Deru akan menguji kemampuannya di Pileg 2024. Putri kedua Herman Deru, Samantha Tivani, mencalonkan diri sebagai bakal caleg dari Partai NasDem.

Sasha, sapaannya, sudah memantapkan diri untuk bersaing mendapatkan kursi DPR RI di Dapil Sumsel II. Sejauh ini, dia sudah aktif di berbagai kegiatan dan menduduki jabatan penting, seperti Ketua Dewan Pakar Perhaptani Sumsel, Ketua KORMI Sumsel, dan Koordinator Wilayah Internasional Council for Small business (ICSB) Sumsel.

Sebelum dia terjun ke dunia politik,

kakak kandungnya, Percha Leanpuri, sudah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 di Dapil Sumsel II. Namun, putri sulung Herman Deru itu meninggal dunia pada 2021.

Tak hanya Samantha Tivani yang mendaftarkan diri sebagai bakal caleg dari Partai Nasdem. Suaminya, Muhammad Yaser, turut serta mencalonkan diri sebagai bakal caleg DPR RI melalui Dapil Sumsel I dari Partai NasDem.

Menantu Herman Deru itu saat ini menduduki posisi sebagai anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, dia mendapat banyak sindiran sebagai kader PAN rasa NasDem. Pasaunya, dia yang masih menjadi kader PAN, sudah mencalonkan diri sebagai bakal caleg dari Partai NasDem.

Terlepas dari isu dinasti keluarga, pasangan suami istri itu mendapat restu dari Herman Deru agar bisa meraih kursi dari Partai NasDem. Bahkan, instruksi dari Ketua Umum Partai Nas-

Dem, Surya Paloh, untuk mencalonkan diri di Pileg 2024 dari Dapil Sumsel 2 tidak diindahkan Herman Deru.

Mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur tersebut tak ingin ambil pusing dengan instruksi tersebut. Dia hanya ingin fokus di Pilkada 2024 untuk bisa meraih kembali kursi kepemimpinan sebagai orang nomor satu di Bumi Sriwijaya. Herman Deru juga seolah ingin memberikan kesempatan bagi anak dan menantunya untuk merasakan persaingan di Pileg 2024.

Nama lain yang bakal maju menuju ke Senayan adalah Ahmad Wazir Noviadi. Dia adalah anak dari Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. Ofi, sapaan akrab AW Noviadi, sudah tak asing lagi di kancah perpolitikan Sumsel.

Rekam jejak karirnya di dunia politik sudah dimulai sejak dia menjabat sebagai anggota DPRD Ogan Ilir beberapa tahun lalu. Ofi juga pernah memenangkan perang suara saat menjadi calon bupati 2016.

Sayangnya, Ofi hanya menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir pada 2016 selama 28 hari. Dia terjerat kasus hukum dugaan penyalahgunaan narkoba. Jabatannya pun lengser dan akhirnya digantikan oleh Ilyas Panji Alam dari PDIP.

“Memang caleg-caleg baru ini adalah anak-anak pejabat. Ini cukup kuat mendongkrak suara mereka. Kita tidak bisa pungkiri, nama besar orang tuanya sangat berpengaruh untuk meraih kemenangan. Terutama nama Herman Deru sangat kuat tarikan elektoralnya,” kata Direktur Eksekutif LKPI, Arianto.

Kehadiran mereka di bursa Pileg 2024 seolah menjadi angin segar untuk membawa suasana baru dari perwakilan kaum milenial. Apalagi, Samantha dan AW Noviadi sudah lama terjun ke masyarakat dan namanya sudah tak asing lagi di Sumsel.

Nama lain yang akan maju dari kekerabatan Gubernur Herman Deru yakni Kolonel TNI (Purn) Ruslan. Adik Ipar Herman

Deru ini siap menjadi bakal caleg DPR RI Dapil Sumsel II yang juga membawa bendera Partai NasDem.

Bupati Empat Lawang, Jonck Mu-

hammad, juga tidak mau kalah dengan Gubernur-Wagub Sumsel. Dia juga memberi dukungan penuh ke putri kandungnya, Nadila Azzahra Putri, yang akan maju di Dapil Sumsel II dengan membawa bendera PAN.

Ada juga petahana DPRD Sumsel dari Partai Golkar, yakni Fatra Radezayansyah. Menantu mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin ini akan kembali mencoba peruntungan di DPR RI. Namun, dia akan menjadi bakal caleg Partai Golkar dari Jawa Barat.

Di provinsi lain, keluarga kepala daerah juga mendaftarkan diri menjadi bakal caleg DPR RI di dapilnya masing-masing. Di Jambi, Ratu Munawaroh, ibu tiri mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai bakal caleg DPR RI dari PDIP. Lalu, Nining Wilasari, istri dari Wakil Bupati Bungo Syafrudin Dwi Aryanto, jadi bakal caleg DPR RI dari PKS.

Gubernur Sulawesi Utara yang juga Ketua DPD PDIP Sulut, Oilly Dondokambey, sudah memberi lampu hijau ke anak kandungnya, Rio Dondokambey untuk mendaftarkan diri sebagai bakal caleg DPR RI melalui PDIP.

Ada juga anak Bupati Enrekang Muslimin Bando yang bernama Mitra Fachruddin, yang merupakan petahana, kembali mencoba peruntungan jadi bakal caleg DPR RI dari PAN.

Selain itu, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya, juga ingin terjun ke dunia politik dengan menjadi bakal caleg DPR RI melalui Partai Golkar.

Anak Tokoh Politik

Tak hanya keluarga kepala daerah yang ingin menjadi wakil rakyat di Senayan, tapi juga anak dari tokoh-tokoh politik di Indonesia yang ingin menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan putri mantan Presiden RI dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri turut memboyong anaknya menjajal kemampuan sebagai bakal caleg DPR RI. Putri sulung Puan Maharani, Pinka Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari atau Pinka Hapsari, diisukan masuk dalam daftar bakal caleg DPR RI.

Ada juga nama Hanum Salsabiela Rais, putri politisi dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, didukung oleh Partai Ummat untuk maju sebagai bakal caleg DPR RI di Pileg 2024 dan sudah mengundurkan diri dari PAN.

Rahajeng Widayawati yang merupakan putri mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga akan maju jadi bakal caleg DPR RI dari PDIP.

Lalu, putra Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Muhammad Hilman Mufidi, juga akan maju sebagai caleg DPR RI dari PKB. Kemudian, Putri Zulkifli Hasan, anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sekaligus Menteri Perdagangan akan menjajal peruntungannya di Senayan melalui PAN. ●





“Saya sudah empat periode di provinsi dan selama ini memang tidak bisa maju ke DPR RI karena ada aturan jika orang tua, istri dan anak tidak boleh pada tingkatan yang sama”

Giri Ramandha N Kiemas

PERSAINGAN POLITISI VS MANTAN KAPOLDA

Pertarungan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Selatan bakal terjadi persaingan yang ketat. Ada banyak nama besar yang akan saling berkompetensi mendapatkan hati masyarakat Bumi Sriwijaya untuk bisa memuluskan jalan menuju Senayan.

Para bakal caleg tak hanya berasal dari partai lama dan sudah punya nama besar. Ada juga partai baru yang sudah menunjukkan taringnya demi eksistensi di kancah perpolitikan Indonesia, termasuk dari Sumsel.

Ketua PDIP Sumsel yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramandha N Kiemas, akan turun gunung di Pileg 2024 demi tiket ke Senayan. Pria 43 tahun ini sudah lama berkiper di dunia perpolitikan Sumsel. Keponakan politisi senior mending Taufik Kiemas ini pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel.

Giri Ramandha N Kiemas sempat mengundurkan diri untuk bertarung di Pilkada Sumsel 2018 mendampingi Doddy Reza Alex Noerdin. Walau harus menelan kekalahan, dia pun kembali bangkit dan menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024.

Nama Giri Ramandha N Kiemas pun cukup bersinar dan tenar menurut hasil survei Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) selama setahun terakhir. Para peserta survei mempercayakan Giri Ramandha N Kiemas menjadi wakil rakyat yang bisa mewakili aspirasi mereka.

Giri mengaku maju jadi bakal caleg Dapil Sumsel II karena mempunyai

alasan kuat. Aturan PDIP mengisyaratkan jika lebih dari tiga periode, maka harus ada izin dari Ketua PDIP Sumsel.

“Saya sudah 4 periode di provinsi dan selama ini memang tidak bisa maju ke DPR RI karena ada aturan jika orang tua, istri dan anak tidak boleh pada tingkatan yang sama. Tahun 2019, almarhum bapak (Nazaruddin N Kiemas) masih ikut pencalegan, walaupun beliau meninggal dunia sekitar tiga minggu sebelum pemilihan,” ucapnya.

Saat akan terjun di Pileg 2024, dirinya akan membawa visi misi partainya. Dia tidak boleh mempunyai visi misi sendiri karena bukan calon independen. Sehingga dia harus menjalankan agenda politik partai.

Dia mencontohkan, PDIP akan selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat di berbagai sektor dan bidang. Dia juga tak mau mengumbar janji-janji ke masyarakat karena belum tahu akan ditempatkan di komisi apa nantinya ketika menang. Namun, yang bisa dia lakukan jika terpilih nanti akan menyuarakan aspirasi rakyat.

“Sering kali kita terjebak pada kondisi anggota legislatif itu bisa semuanya, padahal tidak bisa. Dan anggota legislatif itu bukan seperti kepala daerah yang punya anggaran dan OPD yang langsung

demgan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, apa yang bisa dikampanyekan oleh anggota dewan adalah membawa isu dari daerah pemilihannya, di antaranya infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan kesejahteraan petani.

Namun, dia tidak bisa memastikan apakah namanya akan masuk sebagai caleg DPR RI Sumsel II karena keputusan itu menjadi kewenangan DPP PDIP. Dia mengakui, sampai hari ini pun tidak ada satu kader PDIP yang diberitahu oleh DPP PDIP tentang nama-nama yang lolos seleksi.

Giri membocorkan dalam Pileg 2024, PDIP Sumsel mempunyai target 4 kursi DPR RI, 15 kursi DPRD Provinsi dan 120 kursi DPRD kabupaten/kota.

“Siapa yang nanti diunggulkan, tidak ada. Karena semua caleg diharapkan bergerak maksimal. Seperti petahana Yulian Gunhar dan Riezky Aprilia. Kemudian wajah wajah baru seperti Kolonel (Purn) Ruslan, Henny Astuti, Amirul dan lainnya. Ataupun para pengurus partai yang ada, seperti MA Gantada Septiatirin dan Rynaldo Juliantino. Banyak juga kader lainnya yang mendaftarkan diri,” ujarnya.

Walaupun sudah berada di bawah naungan partai besar, namun Giri Ramandha harus bersaing dengan bakal caleg terdengar dari partai lain-

nya. Salah satunya mantan Kapolda Sumsel, Irjen Pol (Purn) Zulkarnain Adinegara, yang akan maju dari Partai Perindo.

Dari hasil survei yang dilakukan LKPI selama setahun terakhir, hanya Partai Perindo yang mendapat perhatian lebih dari masyarakat Sumsel. Selain nama besar Hary Tanoesudibjo yang memimpin partai ini, kader-kader Partai Perindo juga sudah wara-wiri di dunia politik Indonesia.

Direktur Eksekutif LKPI yang tergabung dalam Perkumpulan Survey Opini Publik Indonesia (Persepi), Arianto, menuturkan, kehadiran partai baru memang cukup sulit bersaing dengan partai besar yang lebih dulu ada. Apalagi untuk mengenalkan para bakal calegnya.

Bahkan, berdasarkan hasil survei tersebut, beberapa partai baru hanya mengantongi suara kurang dari 1 persen. Tapi kondisi itu tidak berlaku bagi Partai Perindo yang sedang mengalami kenaikan tren di Sumsel.

Hal tersebut harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh Zulkarnain Adinegara untuk memenangkan Pileg 2024. Salah satunya agar bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari para kader se-Sumsel.

“Caleg Perindo berpeluang besar dapat satu dapil karena trennya cukup bagus. Tapi untuk partai baru yang lainnya agak susah memang karena belum mendapatkan tempat di hati masyarakat,” ujarnya.

Zulkarnain Adinegara mengakui sudah mantap untuk menjadi bakal caleg DPR RI Dapil Sumsel II walau dia baru bergabung ke Partai Perindo pada Februari 2023.

Sebelum bergabung di Perindo, dia pernah diajak untuk menjadi kader partai lain meski ditolaknya. Sampai akhirnya, Harry Tanoesudibjo sendiri yang menghubunginya dan mengajaknya bergabung sebagai kader Partai Perindo. Kesamaan tujuan untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan itulah yang membuat Zulkarnain mau menjadi kader Partai Perindo.

Dia awalnya ditawarkan Harry Tanoesudibjo menjadi caleg di Dapil Sumsel I, namun Zulkarnain lebih nyaman berada di Dapil Sumsel II. Dapil tersebut meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Empat Lawang, Lahat, Kota Prabumulih dan Pagaralam.

Dapil Sumsel II dipilih karena dia pernah menjabat sebagai Kapolres OKI, Muara Enim, dan akhirnya dilantik menjadi Kapolda Sumsel. Rekan-rekan dan keluarganya juga menyarankan agar Zulkarnain lebih memilih Dapil Sumsel II.●



“Bersatu aja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu dan mengangkat suara Golkar dalam kondisi saat ini”

Jusuf Kalla



GOLKAR TERSANDERA PENGUASA

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla menolak dengan tegas digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum. Pasalnya, Munaslub jelang Pemilu 2024 hanya akan memberikan dampak negatif bagi Partai Golkar.

“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar,” kata JK di Aula Abdul Muis, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Mantan Wakil Presiden RI ini juga menanggapi desakan yang muncul agar pencapresan Airlangga Hartarto dievaluasi. Dia menyatakan, kepemimpinan Airlangga Hartarto untuk saat ini tidak perlu dievaluasi.

“Mau apa lagi, evaluasi apa lagi?” imbuhnya.

Dia menyadari, Partai Golkar di kepemimpinan Airlangga Hartarto amat telat dalam mengambil sikap politiknya. Dia bahkan mengatakan bahwa Golkar seperti bergantung pada penguasa dalam membangun kerja sama politik.

“Karena Airlangga, Golkar-nya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya,” katanya.

Kata Jusuf Kalla, Partai Golkar sebagai pemilik suara terbesar kedua nasional seharusnya bisa mandiri dalam berpolitik. Tidak harus selalu mengikuti partai penguasa yang saat ini memimpin pemerintahan.

“Tidak berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan,” katanya.

Dia mengatakan, partai politik yang lainnya juga sepertinya bergantung pada penguasa. Tidak ada yang berani menunjukkan sikapnya secara mandiri dalam berpolitik.

“Ya semua partai-lah tidak mandiri dalam penentuan. Ini secara demokratis berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu,” terangnya.

Maka dari itu, JK meminta kepada seluruh kader Partai Golkar, terutama pimpinan untuk berani dalam mengambil sebuah keputusan politik. Sebab, kemenangan itu tergantung daripada kekompakan internal partai politik.

Oleh karenanya, dia berharap seluruh kader Partai Golkar bisa bersatu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Bersatu aja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu dan mengangkat suara Golkar dalam kondisi saat ini,” ujarnya.

Dia juga buka suara terkait dorongan dari 38 DPD agar Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kata Jusuf Kalla, dirinya juga berharap agar Airlangga Hartarto bisa mendampingi Prabowo Subianto

sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

“Saya kira itu harapannya untuk masuk dalam cawapres,” katanya.

Dia mengatakan, peluang Airlangga Hartarto untuk maju sebagai cawapres hanya terbuka ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

“Saya kira sempit hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo,” katanya.

Dia mengatakan bahwa Partai Golkar masih terus melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang memang nantinya akan maju di Pilpres 2024.

Dia menilai peluang Airlangga Hartarto memang terlalu sempit karena hanya memiliki satu dari dua capres. Sebab, Airlangga tidak akan merapat ke Koalisi Perubahan.

“Negosiasi terus sekarang ini. Pilihannya sempit, warpresnya sempit, Golkar susah karena semua ke mana-mana, ke Anies sulit,” jelasnya.

JK juga menjelaskan, Partai Golkar sebagai pemilik suara terbesar kedua nasional pastinya akan sangat berpengaruh terhadap elektoral calon presiden. “Karena partai besar dia mempunyai semacam kemampuan untuk meningkatkan suara apabila jadi wakil,” tegasnya.

Sementara itu, analis politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, kritikan Jusuf Kalla terhadap Golkar yang bergantung terhadap penguasa disinyalir sebagai bentuk kekhawatiran bahwa partai berlambang beringin itu tidak lagi memiliki pendirian dalam bersikap.

“Pertama, ia (Jusuf Kalla) khawatir kemandirian Golkar dalam menentukan sikap u n - tuk

Koalisi yang ditenggarai hilang. Kedua, ini menunjukkan JK secara tidak langsung mengkritik Airlangga yang tak punya pendirian, ketegasan bahkan keberanian mengambil sikap mandiri sebagai ketua umum partai,” ujarnya.

Dia menyampaikan, kritikan Jusuf Kalla itu mengindikasikan keprihatinannya melihat Golkar sebagai partai pendukung pemerintah seakan sedang dikontrol oleh penguasa politik saat ini.

“Artinya, JK mengungkapkan kekecewaannya kepada kepemimpinan Airlangga yang lambat dalam menentukan koalisi dan dalam bersikap untuk pengambilan keputusan, bahkan malah menunggu arahan dari penguasa,” terangnya.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo itu mengatakan bahwa Jusuf Kalla sudah merasa kecewa karena Partai Golkar tidak cakap dalam berpolitik. Padahal, partai berlambang pohon beringin itu memiliki modal besar untuk mempengaruhi partai politik lainnya.

“JK juga menganalisa situasi politik institusi Golkar sebagai pendukung pemerintah yang malah layaknya menjadikan pemerintah sebagai penasihat untuk pengambilan keputusan partai Golkar,” ucapnya.

Dia menilai, keterlibatan penguasa dalam menentukan keputusan internal partai politik sudah sangat berbahaya. Seharusnya, partai politik terbebas dari tekanan politik termasuk dari lingkaran kekuasaan.

“Tentu saja ini berbahaya dalam berdemokrasi dan institusi partai tersebut jika rezim p e r a n -

nya sudah masuk ke wilayah partai-partai pendukung pemerintah,” terangnya.

Pengamat politik, Yusfitriadi, menilai Golkar dan orang-orang di lingkaran Istana memiliki relasi yang cukup dekat. Relasi itu akan membuat Golkar melabuhkan pilihan mendukung Prabowo Subianto di 2024.

Terlebih, jika melihat banyaknya prahara yang menimpa Partai Golkar beberapa waktu terakhir, mulai dari isu munaslub sampai Airlangga yang dipanggil Kejagung.

“Ketika Airlangga atau Golkar ke Prabowo bagi Jokowi tidak ada masalah. Melihat circle Golkar, atmosfer Golkar dan psikologi relasi komunikasi Golkar, kecenderungannya Airlangga atau Golkar ke Prabowo Subianto,” kata Yus.

Founder Visi Nusantara Maju itu menerangkan, Prabowo sendiri walaupun Ketua Umum Partai Gerindra memiliki relasi kuat dengan Golkar. Begitupun lingkaran Istana seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Moeldoko atau Bahliil Lahadalia.

Sedangkan, relasi Airlangga dan Golkar tidak kuat dengan Ganjar maupun PDIP. Sehingga, kecenderungan yang ada memang Airlangga dan Golkar akan melabuhkan pilihan dukungan kepada Prabowo Subianto.

Menurut Yus, semua itu didukung elektabilitas Prabowo yang ditangkap lembaga-lembaga survei beberapa waktu terakhir. Prabowo mampu tempati peringkat teratas bursa capres, mampu mengguguli Ganjar maupun Anies.

Oleh karena itu, ia melihat, cepat atau lambat Airlangga maupun Golkar pada akhirnya akan mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Apalagi, Prabowo tidak sedang berhadapan dengan Jokowi. “Justru, Jokowi mungkin merasa nyaman dengan Prabowo,” ujar Yus.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, menilai, dinamika yang terjadi di Golkar juga tidak lepas dari partai beringin yang juga belum menentukan sikap di Pilpres. Golkar beberapa kali mewacanakan akan membentuk koalisi sendiri.

“Lalu digoyang dengan isu munaslub dan pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Karenanya, demi menghindari risiko dan pecahnya soliditas partai jelang Pemilu, Golkar dinilai memilih untuk kembali ke barisan.

Andriadi menyebut, risiko munaslub dan Airlangga yang terseret kasus akan berimbas kepada suara Golkar yang anjlok pada Pemilu 2024.

“Ibarat pepatah sudah jatuh ketimpa tangga pula. Tentu (jika) Ketua Umum (tertangkap) dan munaslub (terjadi). Maka kondisi kacau dan konsolidasi partai Golkar membutuhkan waktu, imbasnya kesiapan menghadapi pileg dan pilpres akan menjadi terganggu, tumbalnya suara partai Golkar akan menurun pada pileg 2024,” ujarnya. ●





“Sekarang trennya naik, jadi itu yang membuat daya tarik bagi partai-partai yang lain untuk gabung ke Pak Prabowo”

Kacung Marijan

RAMAI-RAMAI MERAPAT KE GERINDRA

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dijanjikan akan ada lima partai baru yang bergabung menjelang Pemilu 2024. Saat ini, KKIR sudah beranggotakan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyebut para parpol tersebut akan merapat ke Koalisi KIR pada Agustus dan September 2024. Pada bulan ini, Andre menyebut rencananya akan ada satu parpol lagi yang mendeklarasikan Prabowo dan menambah personel KKIR.

Sejumlah partai politik akhir-akhir ini dikabarkan akan merapat ke KKIR untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Parpol tersebut di antaranya Partai Gelora Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hingga Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik, menyebut pihaknya akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Namun, ia belum menyampaikan waktu pendeklarasiannya.

Ia tak menyampaikan alasan lebih lanjut terkait alasan Partai Gelora mendukung Prabowo. Sebab, hal tersebut pasti akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta dalam pendeklarasiannya nanti.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburrahman, mengatakan, kekuatan koalisi pengusung Prabowo akan bertambah. Klaimnya, mayoritas dari 38 DPD Partai Golkar mendukung Menteri Pertahanan itu sebagai bakal capres.

Namun, ia tak menyebut secara gamblang soal dukungan dari Partai Golkar. Habiburrahman hanya menyampaikan, dukungan hadir dari partai politik yang kemarin baru melakukan pertemuan di Bali.

Di samping itu, ia menyebut adanya partai di luar parlemen yang akan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Namun, ia masih enggan mengungkapkan dan meminta semua pihak menunggu pengumuman resminya.

Pada 2 Agustus 2023, Prabowo Subianto beserta jajaran pengurus Partai Gerindra berkunjung ke Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan persamuhan berlangsung, hangat, serius, namun tetap santai.

Menurut dia, PSI dan Gerindra saling berbagi visi dan kesamaan pandangan. Misalnya, PSI dan Gerindra sama-sama percaya bahwa Indonesia mesti bersatu dan meninggalkan segala perbedaan agar menjadi bangsa yang kuat.

Ihwal dukungan pada Pilpres 2024, Grace mengaku partainya tegak lurus terhadap arahan Presiden Jokowi. Sebagai partai yang mengagumi Jokowi, Grace menyebut PSI ingin kandidat calon presiden melanjutkan program-program RI 1 tersebut.

Sementara itu, Prabowo mengaku gembara kala diundang menyambangi PSI dan mengaku tak mempersoalkan besar kecil sebuah partai kala menjalin silaturahmi.

Prabowo juga menyebut punya banyak kesamaan dengan PSI. Dalam momen pertemuan, Prabowo mengaku banyak menyampaikan pandangan yang ternyata cocok dengan pandangan PSI.

Pria yang juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pengarah Partai Gerindra itu menjelaskan, Indonesia sedianya sudah berada di jalur yang benar. Ia menyatakan bakal meneruskan kondisi tersebut.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, juga mengindikasikan partainya akan berlabuh mendukung Prabowo. Menu-

rutnya, partainya tidak mau mengalami kekalahan ketiga kalinya dalam Pilpres. Viva mengatakan hal itu merupakan salah satu pertimbangan PAN untuk menentukan kerja sama politik atau koalisi di Pilpres 2024.

Selain itu, pertimbangan lainnya bagi partai yang dinakhodai Zulkifli Hasan itu adalah PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Dikatakan Viva, pihaknya ingin melanjutkan program pembangunan nasional.

Viva juga menyinggung soal kedekatan PAN dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Viva mengaku PAN dan Gerindra memiliki hubungan dekat karena pernah berkoalisi di dua pilpres sebelumnya.

“Bagi PAN, Pak Prabowo dan Gerindra dekat dengan PAN. Pernah berkoalisi dua kali di Pilpres 2014 dan 2019. Namun, dua kali tidak berhasil,” kata Viva.

Kendati demikian, Viva belum membeberkan nama capres maupun cawapres yang akan didukung PAN. Ia mengatakan bahwa keputusan itu sepenuhnya dimandatkan kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan, daya elektoral Prabowo Subianto yang meningkat menjadi alasan partai pengusung melabuhkan dukungannya kepadanya.

Menurut Kacung, tingginya daya elektoral itu menjadi faktor penentu banyaknya partai politik yang perlahan mendukung Prabowo untuk memimpin Indonesia periode berikutnya.

“Sekarang trennya naik, jadi itu yang membuat daya tarik bagi partai-partai yang lain untuk gabung ke Pak Prabowo,” kata Kacung dalam keterangannya, Kamis, 3 Agustus 2023.

Hingga Juli 2023, elektabilitas Prabowo terekam terus menunjukkan tren peningkatan. Hal itu tercatat dalam survei yang di-

lakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada periode 1-8 Juli 2023.

Pada Januari 2023, Prabowo hanya meraih dukungan sebesar 23,2 persen. Kemudian, pada Februari 2023, tingkat elektoral menteri andalan Presiden Jokowi itu melompat menjadi 26,7 persen.

Selanjutnya, pada April 2023, elektabilitas Prabowo kian kokoh di angka 30,3 persen. Lalu, puncaknya, Prabowo mengantongi elektabilitas tertinggi versi survei LSI pada Juli 2023 dengan dukungan mencapai 35,8 persen.

Melihat dari hasil survei tersebut, Kacung meyakini jika tingginya daya elektoral Prabowo memang membuat kepincut beberapa partai politik lain yang ingin memberikan dukungan pada orang nomor satu di Partai Gerindra tersebut.

Kacung menyebutkan, probabilitas yang tinggi untuk memenangkan Pilpres 2024 menjadi alasan kuat banyaknya partai politik yang mulai merapatkan barisan mendukung Prabowo. Sejauh ini sudah ada beberapa partai yang sudah dan akan mendukung Prabowo pada pesta demokrasi mendatang.

“Beberapa partai sebelumnya enggan gabung ke Pak Prabowo karena tren Pak Prabowo menurun, sekarang trennya naik,” kata Kacung.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, menilai sebaiknya Prabowo Subianto cukup melakukan safari politik dengan partai-partai besar. Najmuddin mengkritik langkah Prabowo yang menyambangi partai non parlemen seperti PSI.

“Mestinya Prabowo hanya sowan atau menjalin komunikasi politik antar parpol besar atau partai parlemen,” kata Najmuddin.

Najmuddin menyebut kunjungan Prabowo ke PSI sebagai bentuk rasa tidak percaya diri. Karena Prabowo ingin citra sebagai capres yang diresmikan Presiden Jokowi. Diketahui PSI adalah partai yang sangat loyal kepada Presiden Jokowi. Sehingga, Prabowo juga ingin mendapatkan dukungan dari PSI untuk Pilpres 2024.

Najmuddin menilai mestinya Prabowo memperlihatkan rasa percaya diri yang tinggi. Selain punya elektabilitas yang cukup tinggi berdasarkan survei dari berbagai lembaga kredibel, Prabowo merupakan peserta Pilpres paling berpengalaman dibanding kandidat lain. Karena mantan Danjen Kopasus itu selalu bertarung sejak Pilpres 2009. ●



“Dari hasil usulan itu tadi, dengan berbagai pertimbangan, terpilih tiga nama, Prof Asep Mulyana, Prof Keri Lestari, dan Bey Triadi Machmudin”

Achmad Ru'yat



PENJABAT GUBERNUR JABAR TINGGAL DUDUK MANIS

Masa bakti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum akan berakhir pada 5 September 2023. Sesuai ketentuan, DPRD Jabar mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar masa jabatan 2018-2023 pada rapat paripurna, Selasa, 1 Agustus 2023.

Berita acara tentang pengusulan tersebut kemudian ditandatangani pimpinan DPRD dan Ridwan Kamil serta Uu Ruzhanul Ulum. Tahap selanjutnya, berita acara tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Kang Emil, pengumuman itu merupakan tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum mengakhiri jabatan. Terhitung 34 hari lagi jabatannya akan berakhir.

“Tidak terasa sudah lima tahun dari 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan,” ujar Kang Emil.

Kang Emil mengatakan, dalam

sebulan ke depan ada beberapa agenda penting yang akan dilakukannya. Antara lain peresmian monumen Kujang Sepasang di Sumedang, peresmian Situ Bagendit Garut, hingga peresmian operasional kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Joko Widodo.

“Dan kerja-kerja lainnya yang masih menjadi semangat kami di sisa 4 minggu terakhir,” kata Emil.

Kepada masyarakat Jabar, Kang Emil mengucapkan permohonan maafnya bila masih ada pembangunan yang belum maksimal. Bersama jajarannya, dia mengatakan sudah berkerja keras menjadi pemimpin amanah yang membawa aspirasi dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini, menurut Kang Emil, di era kepemimpinannya sudah meraih 541 penghargaan yang menandakan ada 541 perubahan di berbagai bidang. “Silakan dimonitor sebelum dan sesudahnya terjadi perubahan yang signifikan,” kata Emil.

Pencapaian yang paling dibanggakan, kata dia, adalah keberhasilan menghilangkan desa miskin dari seribuan lebih menjadi nol desa miskin selama 4 tahun. Kemudian reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jabar menjadi yang terbaik se-Indonesia.

“Lain-lain di 540-an itu tapi dua terbesarnya itu dan juga menjaga ekonomi Jabar terbaik. Kalau infrastruktur Tol Cisumdawu yang 12 tahun menunggu selesai di era kami, kereta cepat juga Bandara Kertajati yang sudah bisa aktif,” katanya.

Ridwan Kamil juga memastikan penjabat gubernur Jabar yang menggantikannya kelak, selama masa tenggang men-

hasil Pilkada Serentak pada November 2024, tinggal duduk manis.

“Kalau Pj Gubernur Jawa Barat mah insya Allah duduk manis, tidur nyenyak kayaknya ya. Tinggal lanjutkan apa yang sudah kami reformasi. Sebutkan semua dimensi, semua dimensi sudah disentuh. Tidak perlu ada konsep baru,” kata Ridwan Kamil.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pekerjaan utama yang berada di ranah Pemprov Jabar diyakini bakal rampung sepenuhnya, seiring berakhirnya masa jabatan pada 5 September 2023. Sehingga, besar kemungkinan roda pemerintahan Pemprov Jabar layaknya autopilot.

Ridwan Kamil juga berharap Penjabat Gubernur Jabar kelak dapat menjaga ritme yang telah ada. Dia mencontohkan, Persib Bandung yang ketika juara pada 2014, sejatinya tinggal menjaga dan mempertahankan prestasi tanpa harus melakukan perombakan dalam kebijakan yang sudah dibentuk.

“Sehingga penjabat ini yang penting menjaga saja prestasi. Ibarat kayak Persib lah, kalau sudah juara mempertahankan saja enggak usah konsep baru. Supaya hasil lima tahun ini terjaga,” kata dia.

Dia mengatakan keyakinan tersebut tidak lepas dari penempatan pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pemprov Jabar yang disebutnya telah direncanakan dengan matang. Semuanya berasal dari hasil evaluasi sistem reformasi birokrasi yang diaplikasikan.

“Para pejabat Pemprov Jabar sudah punya spirit, siapa pun penjabatnya. Kerja mereka tetap standarnya, seperti saat kami memimpin bersama Pak Uu di Jawa Barat. Jadi tidak akan ada penurunan apa pun yang sangat-sangat profesional,” kata dia.

Dia men-

gatakan selama lima tahun terakhir, ada beberapa kinerja yang diakuinya sebagai pencapaian terbaik selama menjadi gubernur. Pertama yang paling membanggakan adalah sukses menghapus desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengklaim, ketika menjadi gubernur 2018, jumlahnya masih seribuan, sekarang nihil desa tertinggal dan sangat tertinggal. Selain itu, menjadikan sistem reformasi birokrasi terbaik se-Indonesia diakuinya juga turut menjadi prestasi membanggakan.

Ridwan Kamil juga mengaku sudah memiliki agenda pribadi usai lengser. Rencananya, dia akan berlibur bersama keluarga untuk jalan-jalan ke luar negeri menikmati waktu rehat sembari menunggu sikap Partai Golkar yang menjadi bahtera politiknya.

“Saya pamit dulu, mau keliling dunia dulu. 10 tahun tidak ke luar negeri yang sifatnya pribadi, dengan keluarga,” ujar Ridwan Kamil.

Meski demikian, kata Ridwan Kamil, rencana ini masih belum memiliki tujuan pasti negara mana yang menjadi destinasi untuk dikunjungi dalam rangka berlibur. “Duka bade ka mana. Tapi intinya mau jalan-jalan dulu, refreshing. Istirahat,” katanya.

Sementara itu, DPRD Jawa Barat telah menentukan tiga nama yang bakal diusulkan menjadi calon Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat yang diikuti pimpinan dan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPRD Jabar. Dari rapat itu, didapat kesepakatan tiga nama yang bakal diusulkan sebagai calon penjabat gubernur Jabar.

“Dari hasil usulan itu tadi, dengan berbagai pertimbangan terpilih tiga nama, Prof Asep Mulyana, Prof Keri Lestari, dan Bey Triadi Machmudin. Dan kita berdialog DPRD akan melayangkan surat dengan tiga nama ini,” kata Ru'yat, Rabu, 2 Agustus 2023.

Bey Machmudin saat ini menjabat sebagai Deputy Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden. Asep Mulyana saat ini menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM. Asep juga sempat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar. Sementara itu, Prof Keri Lestari adalah guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ru'yat mengungkapkan, ketiga nama yang diusulkan menjadi calon Penjabat Gubernur Jabar tersebut bisa menjalankan peran dan fungsinya yakni melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan secara sinergis.

“Sesuai arahan Kemendagri bahwa kita berharap sampai Pilgub (2024) nanti Pj Gubernur bisa melaksanakan tugas sesuai undang-undang,” pungkasnya. ●





“Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak suara sesuai dengan pilihan masing-masing”

Ibnu Sina

RAKYAT HARUS PANTAU DCS BUKAN HARGA MATI

Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan mengerahkan 3.880 personel untuk mengamankan rangkaian proses Pemilu Serentak 2024. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga akan bekerja sama dengan prajurit TNI dan Pemerintah Kota Banjarmasin demi kelancaran proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kami ingin pemilu berjalan dengan damai dan tertib meskipun terdapat perbedaan pandangan politik,” ungkap Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Atmojo, saat menghadiri apel deklarasi Pemilu Damai 2024 di Kota Banjarmasin, Senin, 31 Juli 2023.

Sabana mengungkapkan, ada sebanyak 1.940 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin. Untuk itu, dia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahun politik.

“Saya mengajak kita semua untuk menjaga kesejukan kota ini demi menyambut Pemilu 2024 dengan suasana yang aman dan damai,” ujar Sabana.

Sabana menekankan, Kota Banjarmasin memiliki peran sebagai barometer di Kalimantan Selatan karena merupakan wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk terpadat dan aktivitas ekonomi paling tinggi.

Oleh karena itu, Sabana menyatakan bahwa situasi yang aman dan nyaman harus tetap dijaga demi mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat, termasuk menjelang pemilu tahun depan.

Selain itu, Sabana mengingatkan pentingnya setiap aksi massa yang sering kali diadakan di Kota Banjarmasin, baik dalam bentuk penyampaian aspirasi maupun demonstrasi lainnya, untuk berjalan dengan tertib dan sesuai dengan tujuan awalnya.

Sabana menilai bahwa aksi unjuk rasa rawan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama dalam situasi tahun politik yang cenderung rentan terjadinya konflik.



Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihak kepolisian siap untuk selalu mengawal setiap aksi massa asalkan telah mendapatkan izin resmi dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kami bersyukur, selama ini demo-demo yang diadakan selalu berjalan dengan tertib, baik oleh kelompok mahasiswa maupun ormas serta serikat buruh,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menyampaikan, pemilu adalah pesta demokrasi yang menunjukkan kedewasaan suatu negara dalam berpolitik. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan negara, rakyat harus diberikan hak suara untuk memilih pemimpin sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pemerintah setempat bertanggung jawab untuk menjaga

min bahwa setiap warga mendapatkan hak suara sesuai dengan pilihan masing-masing,” terangnya.

Ibnu Sina menambahkan, satu suara memiliki peran besar dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, ia mengimbau warga menggunakan hak pilih secara bijaksana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Ibnu Sina juga mengajak semua peserta pemilu untuk selalu mengutamakan etika berpolitik, di mana persahabatan di antara sesama adalah yang terpenting daripada terjadi konflik yang tidak perlu akibat perbedaan pandangan politik.

Ia juga menuntut agar para penyelenggara pemilu bersikap netral dan profesional tanpa memihak kelompok tertentu, terutama para aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan.

Ibnu Sina menekankan bahwa Pemilu 2024 merupakan momentum penting dalam memperkuat persatuan bangsa, karena pemilih yang berdaulat akan menghasilkan negara yang kuat. Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk jajaran Pemkot Banjarmasin, untuk aktif dalam membuat konten-konten positif di media sosial.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengajak warga, terutama warganet dan kaum milenial agar lebih peduli dan turut serta dalam mewujudkan pemilu yang damai.

Ibnu Sina juga mengimbau jajaran Pemkot Banjarmasin, KPU dan Bawaslu Kota Banjarmasin untuk bekerjasama dengan influencer dalam

membuat konten-konten positif yang berisi pesan-pesan pemilu damai, serta ajakan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024.

Harapan Bawaslu dan KPU Kota Banjarmasin maupun imbauan Wali Kota Banjarmasin mendapat respons positif dari para undangan yang hadir, baik Forkopimda, kepala OPD dan pihak lainnya menyatakan kesiapan dukungan mereka.

“Semoga langkah-langkah pencegahan ini dapat membantu menciptakan Pemilu yang aman, damai, dan berjalan dengan lancar di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

DCS Bukan Harga Mati

Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar, mengungkapkan potensi konflik Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin tergolong sedang. Data tersebut diperoleh dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) hasil identifikasi Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.

Yasar berharap, ke depan, tugas menjaga stabilitas sosial politik di Kota Banjarmasin ini menjadi tanggung jawab bersama.

Ia menyatakan bahwa kerawanan dapat terjadi di semua tahapan, terutama pada tahapan pencalonan saat ini. Salah satu potensi kerawanan adalah saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), di mana masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kota Banjarmasin. Sebab, bisa jadi ada calon yang terindikasi menggunakan ijazah palsu atau keterangan diri yang tidak benar.

Terkait DCS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarmasin, Yasar menyatakan bahwa DCS bukanlah harga mati. Warga masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri atau keluarganya yang belum terdaftar, yang nantinya akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

Dalam upaya menjaga hak konstitusional warga, pihak Bawaslu bahkan akan melaksanakan patroli untuk mengawal hak pilih masyarakat. •IRY



“Kami terus melakukan edukasi bagi semua pemilih dalam berbagai kegiatan, mengajak mereka menggunakan hak pilih”



Albertien Vierna Pijoh

KPU GANDENG POLDA SULUT AMANKAN PEMILU SERENTAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polda Sulawesi Utara akan bekerja sama untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Ketua KPU Sulut Kenly Poluan juga telah melakukan pertemuan dengan Kapolda Irjen Pol Setyo Budyanto untuk koordinasi pelaksanaan tahapan pesta demokrasi tahun depan.

Dalam pertemuan tersebut, Kenly Poluan dan Setyo Budyanto juga membahas isu strategis mengenai tahapan kampanye pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Beberapa hal yang dibahas meliputi persiapan masa kampanye dan metode kampanye.

Kenly juga menegaskan bahwa di tingkat provinsi, KPU Sulut akan selalu berkoordinasi dengan Polda terkait untuk menjamin kelancaran Pemilu 2024. Demikian pula di tingkat kabupaten/kota, mereka akan meminta KPU setempat untuk intens berkoordinasi dengan Polres masing-masing.

Kenly mengakui, tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung,

yakni verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Sulut.

“Koordinasi ini bertujuan agar Pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kenly.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budyanto menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal dan mengamankan jalannya tahapan pemilu sampai akhir. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar



seluruh proses pemilu tetap berlangsung aman dan kondusif.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal yang biasa, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan pemilu yang damai.

Dia mengatakan, Polri rutin melakukan pengamanan pemilu setiap lima tahun sekali. Namun, 2024 menjadi istimewa karena pemilu akan diada-

kan serentak. Untuk itu, Polri telah menyiapkan berbagai skenario pengamanan untuk menghadapinya.

“Kami juga mengevaluasi pengamanan pada 2019 sebelumnya untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi, sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah pencegahan agar masalah yang terjadi sebelumnya tidak terulang,” jelasnya.

Namun, dirinya juga mengaku sedikit khawatir mengenai situasi di wilayahnya. Hal ini berdasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu yang menempatkan wilayahnya pada

peringkat 2 sesuai hasil KPU.

Indeks Kerawanan Pemilu menggambarkan akumulasi penilaian dari 2019 hingga 2023 dan beberapa parameter dan ukuran menunjukkan bahwa tingkat kerawanan di wilayah tersebut mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, Kapolda berharap wilayah Sulut tetap aman menjelang

Pemilu 2024 dan Polda Sulut telah siap untuk melaksanakan pengamanan. Ia juga mengingatkan kepada anggota

Polri untuk tetap waspada dan melakukan persiapan serta latihan yang cukup. Para personel yang bertugas dan memonitor situasi di wilayah tersebut diharapkan selalu waspada dan peka terhadap perkembangan terkini.

• IRY



Jaga Partisipasi Pemilih Muda

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara mengumumkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 berjumlah 1.969.603 orang. Dari jumlah tersebut, generasi X mendominasi dengan total 590.049 pemilih, generasi milenial 572.904 pemilih, dan generasi Z mencapai 368.801 pemilih.

Selain itu, jumlah tersebut terdiri dari 993.863 pemilih laki-laki dan 975.740 perempuan. Sementara untuk jumlah kecamatan ada 171 di seluruh Sulut, dan jumlah kelurahan/desa 1.839, dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 8.240.

Anggota KPU Sulawesi Utara, Awaluddin Umbola, mengatakan, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan generasi Z, pihaknya mengajak dan mendorong pemilih muda yang telah memenuhi syarat untuk memilih agar aktif menggunakan hak suara mereka pada Pemilu dan Pilkada 2024.

“Ke depannya KPU Sulut akan merancang program-program menarik, menyesuaikan minat para generasi muda,” sebut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sulut itu, Senin, 31 Juli 2023.

Program yang sesuai dan menarik tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi Z pada Pemilu dan Pilkada 2024. Dengan demikian, diharapkan bahwa lebih banyak generasi muda akan berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan bangsa.

“Kami terus mendorong dan

mengajak adik-adik yang sudah mempunyai hak untuk memilih, menggunakan hak suaranya di Pemilu dan Pilkada 2024 nanti,” ajaknya.

Selain KPU Sulut, KPU Tomohon juga mengajak pemilih pemula gunakan hak pilih pada pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024. “Mereka (pemilih pemula) terus kita dekati agar mereka datang ke tempat pemungutan suara,” sebut Ketua KPU Tomohon, Albertien Vierna Pijoh, Rabu, 3 Agustus 2023.

Dia menjelaskan, jumlah pemilih di kota berpenduduk lebih 100 ribu jiwa tersebut adalah sebanyak 78.022 orang. Jumlah itu terdiri atas 39.072 pemilih perempuan dan sisanya 38.950 pemilih adalah laki-laki, sementara 6.785 di antaranya adalah pemilih pemula.

“Kita mendatangi mereka di sekolah, mengajak dalam berbagai kegiatan, termasuk di antaranya mereka mengikuti cerdas

cermat pemilu. Itu yang kami lakukan agar termotivasi gunakan hak pilih dalam pemilu nanti,” ujarnya.

Dia mengatakan, angka partisipasi pemilih di Kota Tomohon pada pemilu terakhir sebesar 92 persen, sementara target secara nasional sebesar 77 persen.

“Angka itu (partisipasi pemilih 92 persen) diperoleh saat situasi COVID-19, apalagi saat ini sudah melewati pandemi, mungkin bisa lebih banyak lagi yang bisa menggunakan hak pilih,” katanya.

Meski begitu, target realistis partisipasi pemilih sebesar 92 persen, dan akan terus berupaya mencapai 92 persen.

“Upaya kami saat ini adalah memastikan semua warga yang memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu nanti. Kami terus melakukan edukasi bagi semua pemilih dalam berbagai kegiatan, mengajak mereka menggunakan hak pilih,” ujarnya. •





“Kehormatan ini akan kita jaga bersama dan ISNU akan lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat”

Herman Deru

HERMAN DERU KEMBALI PIMPIN ISNU SUMSEL

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali terpilih memimpin Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sumsel melalui sidang pleno konferensi wilayah yang digelar di Ruang Mahameru Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis, 3 Agustus 2023.



Dari 15 PC ISNU yang ada di Sumsel, 12 di antaranya memilih kembali Herman Deru menjadi Ketua PW ISNU Sumsel hingga 2028.

Usai terpilih kembali menjadi Ketua PW ISNU Sumsel, Herman Deru mengatakan akan tetap membawa ISNU tetap pada jalurnya, yakni berbuat lebih baik lagi dalam menjaga kehormatan ISNU, serta bermanfaat lebih banyak untuk kemashalatan umat.

Selain itu, Herman Deru berjanji akan membina ISNU lebih berkembang dan menjaga eksistensinya sebagai organisasi yang mandiri.

“Sungguh ini merupakan kejutan saya dipercaya lagi memimpin ISNU untuk periode 2023-2028. Saya punya amanah yang begitu besar dari segenap pengurus untuk berbuat lebih baik lagi,” ujarnya.

Herman Deru mengucapkan terima kasih untuk seluruh pengurus yang telah mendukung dirinya sehingga terpilih kembali menahkodai ISNU Sumsel.

“Tanpa dukungan, tentu tidak akan bermanfaat. Kehormatan ini akan kita jaga bersama dan ISNU akan lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat,” terangnya.

Herman Deru memiliki beberapa target yang ingin dicapai bersama ISNU selama kepemimpinannya. Salah satu target utamanya adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun IPM Sumatera Selatan sudah termasuk yang paling tinggi sejak 2022, Herman Deru ingin terus memperkuat pencapa-

ian ini.

Selain itu, Herman Deru berharap ISNU akan berkontribusi aktif dalam pembangunan di berbagai sektor di Sumatera Selatan. Sektor-sektor yang menjadi fokus adalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang dianggap strategis untuk kemajuan daerah.

Diketahui bahwa ISNU memiliki anggota dan pengurus wilayah yang berasal dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Keanggotaan

ISNU terdiri dari beragam profesi, termasuk guru, ustaz, dosen, pejabat, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan ISNU untuk berkontribusi dari berbagai bidang dalam pembangunan Sumatera

era Selatan.

Herman Deru juga menekankan bahwa ISNU akan berperan aktif dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan sebagai bentuk bakti NU untuk pembangunan daerah. ISNU berkomitmen untuk membantu kemajuan Sumatera Selatan melalui kontribusi positif dan kolaborasi antarprofesi.

Dengan kepemimpinan Herman Deru sebagai Ketua ISNU, diharapkan organisasi ini dapat semakin kuat dan efektif dalam mewujudkan visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, serta terus berkontribusi dalam pembangunan daerah di berbagai aspek kehidupan.

Sementara, Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU, Ali Masykuri Musa, mengapresiasi Ketua PW ISNU beserta jajaran dan cabang. Ia mengakui program telah berjalan sesuai dengan

AD/ART ISNU.

Ia berharap kehadiran kader ISNU berperan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi yang menjadi prioritas ISNU Sumsel.

“Saya mengapresiasi Ketua ISNU Sumsel beserta jajaran dan cabang. Saya melihat Gubernur Herman Deru adalah kader yang cakap. Karena itu semua Pengurus Wilayah dan Cabang dimanapun berada harus memiliki kemandirian ekonomi dan capacity building,” ucapnya.

Netralitas NU di Pemilu 2024

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan, independensi dan netralitas NU dalam Pemilu 2024 tetap tidak berubah sejak pembentukannya pada 1926.

“NU sebagai institusi masih berpegang pada posisi yang sama sejak 1926, karena ini merupakan keputusan resmi muktamar yang tidak pernah dicabut. Sebagai institusi, NU tidak boleh memihak,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya menyatakan bahwa pada prinsipnya NU mendukung segala hal yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa, termasuk dalam hal pemilu.

Dia juga menegaskan bahwa NU bukanlah partai politik, sehingga tidak memiliki posisi untuk mencalonkan kandidat dalam pemilu. Namun, dia menegaskan bahwa NU membuka peluang apabila ada partai politik yang ingin mengusung kader NU sebagai calon dalam Pemilu 2024.

Terkait dukungan terhadap kader NU yang diusung oleh partai politik, Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya tidak berada dalam posisi untuk memberikan dukungan politik kepada pihak tertentu.

“Ya, dukungan apakah yang bisa diberikan NU? NU ini bukan partai politik. Saya sudah berkali-kali menekankan hal ini. NU bukan partai politik, dan NU tidak berada dalam posisi untuk memberikan dukungan politik,” tegasnya.

Menurutnya, satu-satunya tugas NU terkait pemilu saat ini adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga masyarakat tetap tenang dan harmonis selama proses pesta demokrasi berlangsung.

“NU hanya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar masyarakat tetap tenang, harmonis, tanpa terjadinya antagonisme atau permusuhan antarkelompok akibat agenda politik,” jelasnya.

NU akan terus menyampaikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu hanyalah prosedur rutin untuk menentukan kepemimpinan ke depan.

“Setelah prosedur ini selesai, siapapun yang terpilih, siapapun yang menjadi pemerintah, adalah pemerintahan dari seluruh rakyat Indonesia, dan harus didukung dan ditaati. Kami tidak perlu mempertahankan sikap antagonisme di antara pendukung yang berbeda,” katanya. ●IRY

“Yang kita ingat dari IKP 2022 itu adalah memberikan kita PR besar berkenaan dengan netralitas penyelenggara Pemilu”

Lolly Suhenty



LENGGKAPI PETA POTENSI KERAWANAN PEMILU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menjalin kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai pemenuhan hak politik kelompok rentan, seperti kelompok kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik dan wilayah perbatasan dengan negara lain.

Menurut Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, peluncuran IKP Tematik itu menjawab berbagai permasalahan yang ada di Pemilu 2024. Selain itu, IKP Tematik itu untuk melengkapi pemetaan kerawanan Pemilu pada IKP 2022.

“Dalam waktu dekat, sebelum penetapan calon, sebelum proses kampanye di mulai. Bawaslu akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Tematik. IKP tematik ini untuk menjawab beberapa hal yang belum mampu ter-cover secara detail dalam IKP besar di 2022,” kata Lolly Suhenty dalam acara diskusi media bertajuk Persiapan Penyelenggara Pemilu Menghadapi Kerawanan Pemilu 2024 di Sukabumi, Jumat, 4 Agustus 2023.

Lolly menjelaskan, IKP Tematik tersebut untuk melengkapi terkait permasalahan politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan Pemilu di luar negeri. “Lima tematik IKP

ini akan segera diluncurkan,” ucapnya.

Dia mengatakan, IKP Tematik menjadi hal yang sangat penting untuk memudahkan Bawaslu dalam melakukan mitigasi berbagai potensi kerawanan dalam Pemilu 2024.

“Memudahkan kita semua memastikan berbagai potensi kerawanan bisa kita sikapi dengan strategi terbaik,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Bawaslu juga

akan melibatkan media dalam upaya melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan pada Pemilu mendatang.

“Termasuk salah satu upaya strategi pencegahan dari teman-teman jurnalis,” tuturnya.

Dia menyampaikan, peluncuran IKP Tematik akan

dilakukan di daerah yang memiliki potensi kerawanan Pemilu yang tergolong sangat tinggi.

Dia juga mengungkapkan pada IKP 2022 ada empat provinsi dengan tingkat potensi kerawanan tertinggi. Dari pemetaan tersebut diketahui masih banyak yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan mitigasi pencegahan.

Salah satu yang menjadi catatan pada IKP 2022 adalah berkaitan dengan netralitas penyelenggara Pemilu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“Yang kita ingat dari IKP 2022 itu adalah memberikan kita PR besar berkenaan dengan netralitas penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

Permasalahan terkait dengan netralitas penyelenggara Pemilu itu akan menjadi perhatian khusus Bawaslu. Selain itu, netralitas ASN dan penggunaan media sosial tidak luput dalam pantauan pengawasan.

“Itu menjadi salah satu yang di-highlight, disusul dengan netralitas ASN, disusul dengan medsos,” jelasnya.

Dia menyampaikan, dari hasil kajian dari IKP 2022, Bawaslu telah memberikannya ke berbagai pihak terkait. Hal itu dilakukan agar para pemangku kepentingan dalam melakukan mitigasi pencegahan.

“Karena itu, lalu IKP yang diluncurkan 2022 sudah menjadi hal yang sudah kita distribusikan ke berbagai pihak untuk melakukan mitigasi risiko,” ucapnya.

Maka dari itu, dari hasil IKP 2022 itu diketahui bahwa Bawaslu perlu melakukan kajian kembali terhadap segala potensi yang terjadi pada Pemilu mendatang.

“Ternyata setelah proses ini berjalan, Bawaslu melihat ada kebutuhan untuk merumuskan IKP Tematik,” pungkasnya. ●



Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Kita lihat saja nanti keputusan Mahkamah Konstitusi seperti apa. Bagi Bawaslu, karena belum ada perubahan, maka kita masih on the track terhadap apa yang sudah diatur dalam UU 7,” kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, dalam keterangannya, Jumat, 4 Agustus 2023.

Lolly menyatakan bahwa nantinya akan mengikuti seluruh keputusan dari MK. Sebab, kata dia, putusan MK bersifat mengikat dan harus dijalankan.

“Otomatis kami juga akan ikuti kalau sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, apakah tetap, apakah kemudian direndahkan, maka otomatis KPU akan menindaklanjutinya karena itu norma

yang harus dipatuhi,” jelasnya.

“Bagi Bawaslu apa yang menjadi aturan, apa yang diatur, apa yang diputuskan, maka tidak ada alasan Bawaslu kemudian tidak menindaklanjuti ya,” sambungnya.

Dia menyampaikan, pihaknya akan menyesuaikan keputusan MK dengan tugas dan wewenang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.

“Akan menyesuaikan dalam praktik pengawasan terhadap persyaratan cawapres. Itu jadi item-item yang selama ini menjadi pengawasan melekatnya Bawaslu. Tentu bagi kami (Bawaslu) harus melakukan pengawasan berkenaan dengan norma yang terbaru,” ujarnya.

Dia mengatakan, tahapan Pemilu yang sedang berjalan saat ini tidak akan terganggu dengan gugatan tersebut. Sebab, pendaftaran pasangan capres dan cawapres dimulai pada 19 Oktober 2023.

“Tahapan yang sedang berjalan kan pencalonan legislatif dan pencalonan

DPD, pencalonan untuk presidennya kita masih dalam proses kan, kita lihat dalam proses ini,” tuturnya.

Dia mengharapkan, lembaga yang dipimpin Anwar Usman itu bisa segera memutuskan gugatan batas usia minimum bagi capres dan cawapres tersebut.

“Kalau MK bisa melakukan pengambilan keputusan cepat, mestinya MK akan menghitung dampaknya akan tahapan yang sedang berjalan,” ucapnya.

Dia berharap putusan terhadap gugatan batas usia minimum capres-cawapres dapat segera diputuskan dalam waktu dekat ini atau sebelum pendaftaran pasangan calon (Paslon). “Sehingga walaupun putusan MK itu bermuara misalnya mengabulkan permohonan. Maka, otomatis ini harus bisa ditindaklanjuti KPU. Sehingga, secara teknis, dia tidak menghambat tahap-tahapan yang sedang berjalan,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa permohonan gugatan batas usia minimum capres-caw-

pares tidak akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilu. Namun, jika putusan MK memakan waktu yang cukup panjang, dikhawatirkan menanggung tahapan, khususnya pendaftaran capres-cawapres di KPU.

“Ideal atau tidaknya itu sangat tergantung seberapa cepat nanti MK melakukan proses ini,” jelasnya.

Maka dari itu, Lolly menyampaikan, pihaknya hanya bisa menunggu hasil dari putusan MK tersebut agar nantinya segera untuk ditindaklanjuti. Selain itu, apapun keputusan MK terkait gugatan tersebut, Bawaslu akan menghormati dan mematuhi.

“Tapi selagi proses berjalan, maka sebagai warga negara, termasuk Bawaslu, kami dalam konteks ini adalah menunggu, menghormati sekaligus memedomani UU 7/2017 di Pasal 168 yang memang sampai saat ini belum mengalami perubahan,” tandasnya. ●



“Banyak orang yang terjun di politik ini dadakan, tidak mau berjuang keras untuk masyarakat, karena tujuan mereka ingin merebut kekuasaan”

Charma Afrianto

SELEKSI CALON TERBAIK KOMISIONER BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota di tingkat kabupaten/kota periode 2023-2028.

Dalam pelaksanaan ini, Bawaslu provinsi menjadi perpanjangan tangan Bawaslu RI dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu kabupaten/kota.

Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan dalam bentuk Semi Structured Group Discussion (SSGD) kepada calon anggota Bawaslu kabupaten/kota dengan cara menyampaikan catatan profil kapasitas dan kapabilitas calon kepada Bawaslu untuk pengambilan keputusan penetapan calon terpilih.

Metode SSGD itu adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kelompok peserta latar belakang, pengalaman atau pemahaman tertentu tentang topik yang dibahas. Sedangkan, parameter penilaian SSGD yaitu bagaimana mengukur kemampuan kepemimpinannya, kerja sama, komunikasi, kolektif, kolaboratif, dan jaringan.

Penerapan SSGD ini juga dilakukan Bawaslu Sumsel dengan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan untuk peserta yang lolos ke tahapan akhir. Kegiatan tersebut diselenggarakan



di Hotel 101 Palembang yang diikuti seluruh calon anggota Bawaslu kabupaten/kota di seluruh wilayah Sumsel.

Tes ini dilaksanakan pada 3-5 Agustus 2023 dan diikuti 52 peserta dari perwakilan enam kabupaten/kota di Sumsel yang meliputi Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menuturkan, uji kelayakan dan kepatutan yang digelar menggunakan metode SSGD ini lebih mengarahkan kepada diskusi ke para peserta yang sudah ditentukan.

“Dalam tahapan ini kita mencari beberapa kriteria dalam diskusi itu, salah satunya terkait wawasan dari peserta calon anggota Bawaslu kabupaten/kota di Sumsel. Hasilnya akan disampaikan ke Bawaslu RI untuk menentukan hasil pleno. Kami cuma sebagai pengamat atau yang melakukan penilaian terhadap proses diskusi yang dilakukan oleh peserta Bawaslu kabupaten/kota,” katanya.

Untuk perwakilan Kota Palembang, ada 10 orang peserta yang mengikuti tahapan tes dan akan diseleksi menjadi 5 orang peserta terpilih. Sedangkan dari Ogan Ilir, dari 6 orang kandi-

dat, hanya akan disaring 3 peserta terpilih.

“Yang mendasari mengapa setiap kabupaten dan kota dari calon anggota Bawaslu berbeda-beda memang ketentuan undang-undang dan berdasarkan jumlah penduduk,” ungkapnya.

Salah satu peserta dari Kabupaten Ogan Ilir yang mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan, Lili mengatakan, dia ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan ingin mengawal sistem Pemilu yang berkualitas dan bermartabat demi terlaksananya penegakan hukum pemilu yang jujur dan adil.

“Saat mendaftar di awal kemarin, ada 57 peserta dan setelah itu dilakukan seleksi ulang oleh panitia berhasil disaring menjadi 12 peserta. Ada seleksi lanjutan hingga berkurang menjadi 6 orang peserta. Saya berharap bisa lulus jadi tiga peserta terbaik,” ungkapnya.

Pengalamannya yang cukup mumpuni sebagai anggota Panwascam kelurahan pada 2018-2019 dan anggota PPK Ogan Ilir 2023 diyakininya bisa menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) dari DPR, DPRD, DPD, kepala daerah maupun calon presiden dan calon wakil presiden.

Ketua Bawaslu Palembang, M Taufik, menilai, suasana politik di Kota Palembang menjelang Pemilu 2024 masih aman dan kondusif. Terlebih belum ada penetapan bakal calon legislatif (bacaleg) dari DPR, DPRD, DPD, kepala daerah maupun calon presiden dan calon wakil presiden.

Terkait maraknya pelanggaran di Pemilu nanti, terutama money politic, dia meyakini jika Bawaslu Palembang akan melakukan berbagai upaya pencegahan. Termasuk

mengajak semua elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya masyarakat dalam hal pengawasan partisipatif.

Mereka juga akan mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa untuk sama-sama mengawasi jalannya proses pemilu. Kemudian mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dan memikirkan dampak buruknya, terutama money politic.

Saat ini, Panwascam sudah dibentuk, di mana untuk Palembang ada 18 kecamatan dan di setiap kecamatan ada 3 petugas yang mewakili untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Menyikapi banyaknya oknum Bawaslu yang terjerat dan terlibat korupsi di periode sebelumnya, dia menuturkan hal yang paling penting adalah pengelolaan keuangan anggaran yang harus benar dan tepat oleh sekretariat.

“Untuk besaran anggaran saat ini belum ada untuk Kota Palembang, masih menunggu tahapan Pilkada. Jika Pilkada digelar di November 2024, kemungkinan anggaran tersebut jatuh pada komisioner yang baru. Karena untuk masa jabatan saya akan berakhir pada 14 Agustus 2023,” katanya.

Dia memilih tak ikut pemilihan Ketua Bawaslu Palembang karena ingin memberikan kesempatan bagi generasi selanjutnya. Dia hanya berpesan kepada Ketua Bawaslu Palembang yang baru agar menjalani tugas dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Harus Jadi Wasit

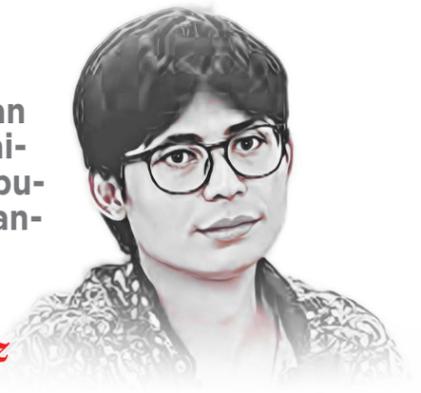
Terkait banyak pelanggaran yang terjadi selama ini, Ketua Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indonesia, Charma Afrianto, meminta agar Bawaslu bekerja layaknya seorang wasit yang mampu mencegah terjadinya berbagai pelanggaran di Pemilu. Sebab, banyak oknum Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tersangkut permasalahan hukum.

Dia berujar, anggota Bawaslu harus menjadi seorang wasit yang baik di pesta demokrasi, seperti mencegah transaksi politik yang masif yakni serangan fajar dan money politic. Namun transaksi politik itu bisa terjadi karena anggaran yang tidak cukup selama menjabat.

Charma menilai, saat ini masyarakat belum punya kesadaran 100 persen terhadap pengetahuan politik. Hanya 60 persen yang sudah paham, sisanya 40 persen masih transaksional.

“Ini tolak ukur saya dari hasil ngobrol di lapangan bersama masyarakat. Kami tidak tahu siapa yang memberikan uang langsung diterima, ini kan namanya peluang, sehingga terjadinya transaksi politik itu. Banyak orang yang terjun di politik ini dadakan tidak mau berjuang keras untuk masyarakat, karena tujuan mereka ingin merebut kekuasaan. Sehingga di otak mereka enak menjadi anggota DPR, enak menjadi kepala daerah mengelola uang banyak, gimana caranya,” ujarnya. ●





LINDUNGI DATA PRIBADI PEMILIH

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan enam instansi/lembaga negara untuk melindungi data daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Lembaga itu di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Siber Crime Mabes Polri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Saat ini, perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting. Sebab, kerap terjadi dugaan kebocoran data pribadi masyarakat yang dilakukan kelompok tertentu.

"Pengamanan juga, punya gugus tugas dengan enam instansi yang lain termasuk BSSN, badan intelijen, turut mengamankan KPU dari sisi kerja masing-masing mereka," kata Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Rabu, 2 Agustus 2023.

Dia menegaskan, pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran terkait dengan perlindungan data pribadi terhadap daftar pemilih tetap.

"Sistem keamanan siber kita (KPU) sudah keluaran (surat) edaran terkait dengan itu (perlindungan data pribadi) untuk mengatasi phising dan segala bentuk malware," jelasnya.

Betty menyadari sekuat apapun keamanan siber, pasti akan ada celah untuk membobolnya. Meski begitu, KPU akan tetapi melakukan beberapa langkah mitigasi agar data pemilih tidak bocor. "Karena kita tau pasti ada ancaman terkait dengan sistem informasi. Tentu harus kita siapkan," terangnya.

Menyoroti DPT pada Pemilu serentak 2024, Betty tidak memungkiri bahwa setiap hari akan terjadi perubahan. Kendati begitu, penetapan DPT nantinya untuk menghitung alokasi kebutu-

han logistik.

"Pasti ada perubahan setiap hari, tapi ini perlu kita tetapkan untuk menetapkan logistik dan hal-hal yang lain," jelasnya.

Salah satu kemungkinan data DPT bisa berubah karena seseorang atau pemilih yang masuk dalam data meninggal dunia sebelum pencoblosan. Jika hal itu terjadi, KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

"Oleh karenanya, kalau ada perubahan meninggal dunia kita dapatkan officially de jure dari misalnya Dukcapil akan kami tandai," terangnya.

Dia menyampaikan, pemilih yang meninggal dunia nantinya akan akan dicoret dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kata dia, pemilih yang pindah pilih juga tidak akan dihapus dalam DPT.

"Nanti akan kita dicoret, tapi tidak akan kita hilangkan termasuk untuk yang pindah keluar," imbuhnya.

Betty menambahkan, pihaknya juga tidak dapat melarang para pemilih untuk pindah lokasi memilih. Sebab, tidak jarang dari para pemilih pindah lokasi karena kepentingan pekerjaan dan hal lainnya.

"Setiap hari ada yang meninggal dunia, pindah (lokasi memilih), masuk, itu di luar kuasa KPU untuk 'eh jangan pindah masuk-keluar,'" ujarnya.

Betty menegaskan bahwa pihaknya juga akan mengawal pemilih yang berada di lokasi khusus, salah satunya di wilayah pertambangan.

Dia mengatakan bahwa warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dapat memberikan hak suaranya di Pemilu serentak 2024.

"Jadi memilih itu adalah hak di Indonesia tidak

bisa kita paksaan orang mau menggunakan hak pilih, termasuk mendirikan TPS atau tidak," katanya.

Kendati begitu, Betty mengatakan, mendirikan TPS di wilayah khusus juga harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU 7/2017. "Sepanjang mereka memenuhi syarat untuk akan kita permudah untuk menjadi pemilih di lokasi khusus," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati, mengingatkan kepada KPU untuk berkerja secara transparan dan akuntabel para proses pendataan daftar pemilih tetap.

"Penyelenggara Pemilu harus transparan dalam prosesnya, bisa menjelaskan kepada publik jika ada data yang dihapus atau bertambah," katanya.

Dia menyampaikan keterbukaan informasi dari penyelenggara akan mempengaruhi penilaian dari masyarakat di seluruh Indonesia.

"Agar bisa meningkatkan kepercayaan publik," katanya.

Dia menjelaskan, data pemilih setiap harinya dapat berubah karena kondisi tertentu. Maka dari itu, dia menyarankan agar KPU terus memperbarui data dari pemilih.

"Lalu data pemilih adalah data yang dinamis (terus bergerak), untuk itu kpu harus memastikan datanya akurat, komprehensif, dan update," imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan daftar pemilih tetap ini juga kerap dipersoalkan oleh partai politik peserta Pemilu.

"Hal yang tidak kalah penting adalah peran dan peserta pemilu, karena biasanya peserta pemilu mempersoalkan masalah DPT ini diujung saat hasil pemilunya sudah diketahui," pungkasnya.●



KPU-Jurnalis Harus Harmonis

Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki rekam jejak atau hubungan yang baik dengan wartawan atau jurnalis kepemiluan. Hubungan yang terus dijaga, terutama dalam mendukung suksesnya tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Menurut Anggota KPU, Au-

gust Mellaz, hubungan yang baik ini setidaknya bisa terlihat dari proses peliputan kepemiluan di KPU. Menurutnya, setiap tahapan selalu disampaikan secara terbuka kepada rekan-rekan jurnalis.

"Kami juga selalu berinteraksi dengan teman-teman media, di KPU menyampaikan tahapan. Meskipun kadang teman media mengejar isu yang sebetulnya tidak perlu dipolemikkan, karena kami juga ada agenda sendiri, mungkin di situ situasi yang kadang dianggap pertentangan," kata Mellaz yang hadir sebagai narasumber Diskusi Multi Stakeholder Dalam Mendorong Perlindungan Jurnalis dan Independensi Media yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Pers di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023.

Mellaz menyampaikan, lembaganya

menyadari sebagai pusat dari informasi kepemiluan di Tanah Air, maka KPU harus terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan pun beraneka ragam, baik melalui media sosial maupun laman resmi KPU.

"Kami bombardir informasi pemilu, tahapan pemilu, pada tahapan apa dan di level mana. Dan itu mulai dari tingkat pusat sampai dengan provinsi dan kab/kota. Hal semacam itu yang sebenarnya jadi konsen kami," ungkap Mellaz.

Mellaz menyambut baik diskusi terkait jurnalis dan independensi media pada momen pemilu ini. "Harapan saya ada rencana tindaklanjut pasca workshop atau FGD ini," tutup Mellaz.●





“Ada 580 orang dari 84 daerah pemilihan, lengkap 100 persen dan tidak ada satupun tokoh nasional atau artis”

Said Iqbal

PANGGUNG POLITIK ARTIS JADI CALEG

Para artis kini tidak lagi berburu panggung konser atau panggung sinetron. Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, mereka berbondong-bondong meraih posisi untuk mengisi panggung politik dengan ikut gabung bersama berbagai partai politik.

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi yang paling banyak disorot karena menggandeng banyak artis kenamaan dan membawa suasana yang lebih energik dan milenial.

Verrel Bramasta, anak dari artis dan politisi Venna Melinda, memilih bergabung dengan PAN pada 9 Februari 2023. Tak butuh waktu lama untuk berpikir, dia langsung mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat.

Pasangan suami istri Uya Kuya dan Astrid juga menjadi salah satu kader PAN. Bahkan Surya Utama, nama asli Uya Kuya, sangat konsen dalam advokasi para Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri melalui berbagai program PAN.

Uya Kuya sendiri akan melenggang di bursa caleg DPR RI, sedangkan Astrid Kuya menargetkan kursi DPRD, meskipun belum dibocorkan akan memilih daerah mana.

Tak hanya itu, di PAN juga ada beberapa artis senior, mulai dari Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang akan nyaleg lagi di Pileg 2024. Ketua DPW PAN DKI Jakarta ini pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Nama lain adalah artis senior Desy Ratnasari yang resmi bergabung dengan PAN di 2013. Dia mencoba peruntungan ikut Pileg dan akhirnya menjadi wakil rakyat selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Bukannya maju menjadi caleg, Desy Ratnasari bahkan diisukan akan maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jabar 2024-2029.

Ada juga vokalis Band Ungu, Sigit Purnomo Syamsudin Said atau dikenal dengan

nama Pasha Ungu yang terjun

ke dunia politik saat menduduki jabatan sebagai Wakil Wali Kota Palu 2016-2021. Namanya juga disorot karena akan mencalonkan diri menjadi caleg di Pileg 2024.

Namun tak selalu artis betah untuk bergabung di PAN. Contohnya Anang Hermansyah yang akhirnya memilih pindah partai dari PAN ke PDIP. Dia mengaku begitu mengagumi sosok Megawati Soekarnoputri yang kharismatik dengan gaya kepemimpinannya yang ideal.

Setelah hiatus sebagai wakil rakyat sejak 2019, kini Anang Hermansyah akan menjadi caleg dari Dapil Jabar 5 yang meliputi Kabupaten Bogor. Mantan istri Anang Hermansyah, Kris Dayanti, yang juga caleg petahana, juga sudah didaftarkan menjadi caleg dari PDIP.

Artis-artis lainnya juga tak mau kehilangan kesempatan untuk menjadi wakil rakyat dari PDIP. Sebut saja Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Nico Siahaan, Once Mekel, Marcell Siahaan, Taufik Hidayat Udjo, Deni Cagur, Tamara Geraldine, Sari Yok Koeswoyo, Lita Zen, Lucky Perdana dan Andre Hehanusa.

Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ada beberapa artis yang sudah didaftarkan ke KPU untuk Pileg 2024, seperti Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami, Arzeti Bilbina, Camelia Lubis, Zora Vidyanata, dan Norman Kamaru.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menargetkan ada 100 kursi yang bisa diraih dari ratusan kadernya yang akan mendaftarkan diri sebagai caleg di Pileg 2024.

Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh juga menakhodai artis-artis populer di Indonesia yang berlatar belakang penyanyi, pemain sinetron, pemain film hingga presenter.

Mereka adalah Choky Sitohang yang memilih Dapil Jabar 6, Annisa Bahar untuk Dapil Jateng 9, Reza Artamevia di Dapil Banten 3, Ali Syakieb dan Didi Riyadi untuk Dapil Jabar 11, Nafa Urbach di Dapil Jateng 6, Diana Sastra di Dapil Jabar 8, serta presenter Ramzi di Dapil Jabar 5.

Sementara itu, di Par-

tai Gerindra juga banyak artis-artis yang nyaleg di Pileg 2024. Di antaranya, pebulatangkis Taufik Hidayat, penyanyi Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, Ari Sihasale, Derry Drajat, cucu Presiden Soekarno Didi Mahardika, Rachel Maryam, pembalap Moreno Soeprapto dan Jamal Mirdad.

Jika di partai lain banyak artis-artis yang bergabung, berbeda di Partai Golkar. Hanya ada empat artis yang menjadi kader partai berlambang pohon beringin ini, yakni Tantowi Yahya, Nurul Arifin, Tetty Kadi dan Charles Bonar Sirait.

Artis di Partai Baru

Hary Tanoesoedibjo juga menggandeng artis-artis kenamaan yang menjadi kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan tertarik menjadi caleg di Pileg 2024. Mereka yakni Venna Melinda, Vicky Prasetyo, Ustad Yusuf Mansur, Zee Zee Shahaab, Limbad, Dede Sunandar, Chef Arnold hingga artis yang lagi viral saat ini, Aldi Taher.

DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai mantan vokalis band Nidji, Giring Ganesha, juga menambah panjang deretan kadernya dari kalangan artis.

Di antaranya Doadibadai Hollo alias Badai eks gitaris Kerispatih yang akan maju di Dapil Jabar 6 yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi. Lalu ada komika Mongol Stres yang maju di wilayah Sulawesi Utara.

Partai Gelora yang merupakan partai baru juga ada nama artis senior yang termasuk pendiri partai ini, yakni Deddy Mizwar. Ada juga model senior Ratih Sanggarwati dan pelawak kawakan Ming Bagito. Kalau partai-partai lainnya

mengusung para artis untuk dimajukan sebagai caleg di Pileg 2024, lain lagi dengan Partai Ummat dan Partai Buruh yang tidak merekrut kader yang berlatar belakang artis.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bap-pilu) Partai Ummat, Taufik Hidayat, berujar, mereka lebih berpolitik dalam melawan kezaliman dengan menggunakan keadilan.

Sementara itu Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis jika mereka bisa meraih 30 kursi DPR RI dari 16 dapil yang ada di Pileg, walaupun tanpa ada kader dari artis maupun tokoh nasional.

“Ada 580 orang dari 84 daerah pemilihan, lengkap 100 persen dan tidak ada satupun tokoh nasional atau artis,” ujar Said Iqbal.

Banyaknya artis-artis ibu kota yang nyaleg di Pileg 2024 berbarengan dengan peluncuran single terbaru band Gugun Blues Shelter (GBS) berjudul ‘Bad Politician’, yang ada di album bertajuk ‘Coming Out’.

Lagu yang mengangkat isu-isu politik ini membahas tentang janji-janji politikus yang tidak ditepati saat sudah jadi wakil rakyat dan permasalahan suap serta kasus korupsi.

Ternyata lagu ini menjadi bentuk protes Gugun karena perilaku politisi yang mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Tembang ini juga dipersembahkannya bagi para caleg dari kalangan artis yang terkesan tidak serius masuk ke dunia politik.

Dia juga mengingatkan kepada para musisi yang terjun di dunia politik agar tetap fokus pada isu-isu yang relevan bagi para musisi, yakni Undang-Undang (UU) Hak Cipta.

“Banyak rekan artis yang terlalu berani, sepertinya jadi wakil rakyat itu hanya bahan candaan. Lagu-lagu ini mengekspresikan banyak keresahan, komplain dan keluhan,” katanya. ●



“Hoaks muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum. Karena terkada ada yang ditindak dan dibiarkan, sehingga muncul niat lagi untuk membalas dengan informasi bohong”

Herman Khaeron



JANGAN SALAH PILIH PEMIMPIN YANG BENAR

Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan pentingnya pemahaman atas pilar-pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan ini penting untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara.

“**A**pa sih 4 pilar itu? Itu adalah 4 pilar bernegara, penyangga kita bernegara. Namanya 4 pilar harus menjadi satu kesatuan. Tugas MPR selain melantik presiden adalah memastikan bahwa proses bernegara kita sesuai dengan ideologi negara kita, salah satunya melalui 4 pilar ini,” kata Muzani saat menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin, 31 Juli 2023.

Menjelang Pemilu 2024 yang akan datang, Muzani mengajak para mahasiswa dan juga anak-anak muda lainnya untuk cermat dalam memilih calon pemimpin. Karena program-program pemerintah yang akan dijalankan nantinya adalah janji-janji selama masa kampanye berjalan.

“Dulu sebelum diamendemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun

program kerja pemerintah melalui GBHN. Tapi sekarang setelah diamendemen, program kerja pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-janjinya calon presiden. Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia, termasuk adik-adik, untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin, karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya,” jelas Muzani.

“Jadi siapa nanti yang akan terpilih, maka itu yang akan jadi

program kerja pemerintah. Termasuk soal IKN itu bergantung dari masing-masing calon presiden,” tambahnya.

Muzani juga berbicara mengenai komitmen pemerintah

dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Muzani, siapapun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD tersebut.

“Tanah di Kaltim ini bisa dikatakan adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Di bawah kita berpijak sekarang ini ada minyak. Di bawah minyak dan di atas ada minyak yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak. Dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya. Tapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting,” jelas Muzani.

Untuk itu, Muzani mengajak agar 2024 nanti untuk tidak salah memilih pemimpin. Di saat Indonesia berusia satu abad, harapannya sudah terlepas dari kemiskinan dan masalah stunting. Karena itu, proses pemilu adalah hal penting untuk dicermati.

Muzani juga mengatakan, perbedaan pilihan politik juga jangan sampai menjadi sumbu-sumbu perpecahan. Perbedaan adalah hal yang wajar dari iklim demokrasi yang sudah dijalankan sejak reformasi. Apalagi, Kalimantan Timur akan menjadi etalase terdepan Indonesia saat IKN sudah berdiri.

“Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda, tapi selalu bawa pesan persatuan. Saya jauh-jauh dari Jakarta membawa salam persatuan. Dan Kaltim akan jadi halaman depan republik Indonesia saat IKN sudah terbentuk,” tutup Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu. ●



Tahan Diri Sebar Hoaks

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, meminta semua pihak dapat menahan diri agar tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks pada saat Pemilu 2024.

Dia menilai semua pihak seharusnya terlibat dalam konstentasi pemilu seperti partai politik, kader hingga simpatisan agar dapat mengedepankan visi misi kebangsaan daripada harus menyebarkan hoaks.

“Saya kira hal-hal ini perlu dilakukan juga untuk semuanya, kita menahan diri untuk tidak melakukan black campaign, di mana kalau pesan Pak Prabowo kepada kita harus tetap tenang dan kedepankan kita beradu visi untuk memajukan negara ini, itu pesannya,” kata Wihadi.

Wihadi mengatakan, saat ini, masyarakat lebih percaya media sosial dibandingkan

berita yang ada di media mainstream. Karena itu, dia menilai hal tersebut menjadi tugas semua pihak seperti pers bagaimana memberikan sajian berita agar bisa lebih terpercaya, sehingga masyarakat pun percaya kepada media mainstream bukan kepada medsos.

“Saya kira hal ini perlu ada satu pengawasan terhadap medsos dalam undang-undang ITE sebenarnya sudah jelas, undang-undang permasalahan yang mengatur undang-undangnya sudah jelas, cuman memang medsos ini boleh dikatakan tidak terbendung dalam satu menit itu bisa sekian mereka bisa posting sekian juta orang bahkan,” ujarnya.

Karena itu, menurut Wihadi, pers harus bisa menghalau munculnya hoaks di tengah Masyarakat. Yaitu dengan menyajikan berita-berita terpercaya dengan pernyataan

narasumber yang terverifikasi kebenarannya.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Herman Khaeron, menilai munculnya informasi hoaks disebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hal itu menurut dia menyebabkan tidak adanya efek jera para pelaku pembuat hoaks sehingga terus membuat konten hoaks.

“Hoaks muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum. Karena terkada ada yang ditindak dan dibiarkan sehingga muncul niat lagi untuk membalas dengan informasi bohong,”

kata Herman.

Karena itu, dia menilai ke depannya perlu ada regulasi yang tegas yaitu siapapun yang menggunakan medsos dengan menyajikan konten memecah belah kerukunan dan persatuan, maka harus ditindak tegas. ●





“BNPT harus buat lebih banyak program untuk anak muda, maksimalkan penggunaan media sosial. Saya yakin BNPT pahami tantangan itu”

Ahmad Sahroni

INFO

LEGISLATIF

19

Minggu II • Agustus 2023

UNTUK PEMILU PANGGLIMA TNI BISA TUNDA PENSIUN

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman akan memasuki masa pensiun pada akhir 2023. Sementara, Pemilu 2024 digelar pada Februari 2024 atau selang beberapa bulan setelah keduanya pensiun.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, menilai, idealnya pergantian Panglima TNI serta KSAD dilaksanakan setelah Pemilu 2024.

“Idealnya adalah Panglima TNI dan KSAD ini dilakukan pergantian setelah pemilu karena sangat dekat,” kata Bobby dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Hanya saja, jika memang kondisi pergantian tersebut ingin diberlakukan, maka harus dilakukan revisi tentang UU TNI. “Akan tetapi memerlukan revisi pasal 53 UU TNI 34/2004 tentang TNI,” kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, walaupun tetap diharuskan pergantian Panglima TNI dan KSAD, maka dinilai penting untuk melihat rekam jejak dari figur lanjutan. Terlebih, kedua jabatan itu dinilai strategis dalam menjaga

keamanan saat Pemilu.

Tak hanya itu, sosok pengganti Panglima TNI dan KSAD juga harus memiliki masa aktif lebih dari satu tahun dari pelantikan nantinya. Sehingga, program yang telah ada bisa dituntaskan.

“Kiranya tetap dilaksanakan pergantian, Panglima TNI dan KSAD memiliki jejak rekam yang mumpuni, dan memiliki usia masa aktifnya lebih dari satu tahun agar program-program yang perlu kesinambungan bisa dilaksanakan dalam satu kepemimpinan yang relatif cukup waktu,” ujarnya.

Sebagai



informasi, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun dari dunia militer pada 1 Desember 2023. Sementara, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman juga akan memasuki pensiun lebih dahulu yakni pada November 2023. Keduanya pensiun ketika menginjak usia 58 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 UU TNI.

Analisis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menyebut, demi alasan stabilitas nasional jelang pelaksanaan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo berpotensi memperpanjang masa dinas aktif KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

maupun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hingga pergantian kepemimpinan nasional pada akhir Oktober 2024.

Menurut Ginting, bukan hal baru jika presiden akan memperpanjang masa dinas aktif keprajuritan bagi perwira tinggi bintang empat. Apalagi dengan mendapatkan persetujuan DPR, hal ini bisa saja dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu mengemukakan, pernah ada preseden sebelumnya di era Orde Baru. Tiga Panglima ABRI mendapatkan perpanjangan dinas aktif, yakni: Jenderal LB Moerdani (pensiun 56 tahun), Jenderal Try Sutrisno (pensiun 58 tahun), dan Jenderal Feisal Tanjung (pensiun 59 tahun).

“Padahal usia pensiun perwira ABRI saat itu 55 tahun,” kata Ginting.

Hal yang sama terjadi pada era Reformasi. Pertama, Presiden Megawati pada 2002 memperpanjang usia pensiun Jenderal Endriartono Sutarto. Saat itu yang berlaku UU 2/1988 tentang ABRI. Usia pensiun perwira TNI saat itu 55 tahun.

Kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Endriartono Sutarto dari 58 tahun menjadi 59 tahun. Saat itu sudah ada UU 34/2004 tentang TNI. Usia pensiun perwira TNI 58 tahun.

“Siapa yang akan diperpanjang masa dinas aktif keprajuritannya di antara dua jenderal bintang empat itu menjadi hak prerogatif Presiden. Siapa yang lebih dipercaya Presiden Jokowi antara Dudung atau Yudo? Menurut saya keduanya akan tetap diberikan kedudukan terhormat, seperti jabatan menteri kabinet,” kata Ginting. ●RDO

Waspada Ancaman Terorisme

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengingatkan, adanya potensi ancaman teror pada tahapan Pemilu 2024. Menurut dia, ancaman teror dan penyebaran paham radikal saat ini semakin canggih serta bisa menyusup lewat berbagai agenda, termasuk politik.

“Era saat ini sudah canggih, ancaman terorisme dan penyebaran paham radikal bisa masuk lewat mana-mana,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023.

Sahroni menjelaskan, dugaannya itu dilandasi beberapa alasan, seperti bahwa pada tahun politik aktivitas media sosial akan meningkat. Ada potensi paham-paham radikal itu masuk dan mengincar anak muda lewat media sosial.

Untuk itu, dia meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme maupun penyebaran paham radikal yang sekarang dapat masuk melalui banyak celah.

“Penting bagi BNPT untuk selalu aware dan catch up dengan perkembangan saat ini. Pelajari modus-modus terbarunya,” imbuah Politisi Partai NasDem ini.

Sahroni juga menyarankan agar BNPT membuat lebih banyak program yang akrab dengan anak muda. Tujuannya agar BNPT dapat meminimalisir tersebarnya paham radikalisme di tengah generasi muda.

Misalnya dengan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk kampanye anti-radikalisasi. Sebab, generasi saat ini sulit tertarik dengan cara-cara lama, mesti sejalan dengan perkembangan zaman yang sudah mengarah ke dunia digital.

“BNPT harus buat lebih banyak program untuk anak muda, maksimalkan penggunaan media sosial. Saya yakin BNPT pahami tantangan itu,” urai Sahroni.

Sahroni mengapresiasi capaian kinerja BNPT yang mengklaim serangan terorisme di Indonesia terus menurun sejak 2018. Penurunan kasus serangan terorisme sejak 2018 sampai saat ini mencapai lebih dari 89

persen.

Kendati demikian, Sahroni tetap meminta BNPT selalu mengedepankan langkah-langkah inovatif serta kolaboratif dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dia menyebut, menurunnya angka serangan terorisme tidak bisa menjadi alat ukur satu-satunya, karena masih banyak yang bergerak secara diam-diam.

“Apalagi, serangan teroris itu bentuknya banyak, bisa serangan langsung hingga doktrin. Jadi BNPT harus terus menciptakan program-program inovatif serta kolaboratif guna redam segala ancaman tersebut,” tandas Sahroni.

●RDO



“Kita perlu terus mengkaji perbaikan terhadap akses kebutuhan dasar serta taraf hidup kelompok penyandang disabilitas”

Yusharto Huntoyungo



DEKAT PEMILU BARU NAMBAH BLANGKO E KTP

Dokumen administrasi kependudukan berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dipas-tikan dipenuhi Kementerian Dalam Negeri jelang Pemilu 2024. Pasalnya, terdapat tambahan blanko untuk penerbitannya, terutama untuk masyarakat yang akan memilih namun belum punya e-KTP.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menjelaskan, pihaknya melakukan pengadaan tambahan blanko e-KTP untuk ketiga kalinya pada 2023.

“Penambahan blanko e-KTP pada awal Agustus 2023 ini adalah sebanyak 11.393.783 keping,” ungkap Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023.

Teguh menjelaskan, pengadaan blanko e-KTP kali ini diperlukan karena blanko yang disediakan sebelumnya telah habis, di mana berjumlah 10.450.518 keping di tahap pertama dan

2.683.032 keping pada tahap kedua.

“Diharapkan stok blanko e-KTP ini akan mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023,” kata dia.

Teguh mengatakan, blanko yang bisa digunakan jajaran Dukcapil daerah untuk menerbitkan e-KTP mulai 4 Agustus 2023, diutamakan bagi beberapa k a t -



egori warga.

“Kepada seluruh Kadis Dukcapil se-Indonesia kami arahkan betul-betul agar cermat dalam memanfaatkan blanko e-KTP dan untuk saat ini alokasi peruntukannya diprioritaskan,” harapnya.

Dia menyebutkan, beberapa kategori warga yang memanfaatkan 11,3 juta blanko e-KTP itu adalah penduduk yang sudah rekam tapi belum dicetak; pemilih pemula, penduduk yang terkena dampak pemekaran wilayah, penduduk yang berubah elemen datanya.

“Contohnya (penerbitan diutamakan bagi penduduk yang berubah elemen datanya adalah yang) ganti alamat, ganti status perkawinan. Kemudian pendudukan admin-d u k , contohnya sakit, disabilitas. Serta (w a r g a yang) hi-

lang/rusak e-KTP-nya,” beber dia.

Teguh juga berharap blanko yang ditambahkan bisa membantu kelancaran proses Pemilu 2024, mengingat ada pemilih pemula yang memegang e-KTP untuk memenuhi syarat datang ke TPS.

“Dengan demikian diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar, pelayanan admin-d u k kepada masyarakat makin meningkat, dan pelayanan publik juga akan makin baik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik ini masuk di dalamnya. Menunjukkan e-KTP merupakan syarat bagi pemilih agar bisa mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.

“Dengan demikian diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Lolly Suheny menyoro-ti hasil pencermatan daftar pemilih yang sudah ditetapkan menjadi DPT pada 2 Juli 2023. Pihaknya menemukan ada 4 juta lebih pemilih yang terancam tidak bisa mencoblos.

Lolly mengatakan, 4 juta warga itu belum memiliki e-KTP. Temuan ini berasal dari lampiran berita acara KPU di tingkat provinsi. Dia menyebut, berdasarkan Pasal 348 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, salah satu sarat bisa mencoblos yakni memiliki e-KTP. ●RDO

Pemilu Ramah Disabilitas

Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi deklarasi akses Pemilu ramah disabilitas yang dinyatakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Nasional Disabilitas (KND), Pusat Pemilahan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), serta Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI). Deklarasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan akses Pemilu ramah lingkungan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berpegang teguh pada prinsip no one left behind atau tidak meninggalkan pihak-pihak tertentu dalam proses pencapaian pembangunan, termasuk tidak meninggalkan kelompok penyandang disabilitas.

Menurut Yusharto, jauh sebelum itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan inklusif ramah disabilitas, ter-

masuk dalam hal pemilu.

Dia berharap PPDI selaku perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia dapat menghimpun harapan, saran dan gagasan dari berbagai pihak guna mengoptimalkan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas.

“Kita perlu terus mengkaji perbaikan terhadap akses kebutuhan dasar serta taraf hidup kelompok penyandang disabilitas,” ungkap Yusharto dalam acara pembukaan Rakernas PPDI Masa Bhakti 2022-2027 dengan tema Saiyo Kito Sajalan di Padang, Kamis, 27 Juli 2023.

Tidak hanya dalam pemilu, penyandang disabilitas juga masih kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, teknologi dan inklusi keuangan. Hal itu, membuat tingkat kemiskinan penyandang disabilitas relatif tinggi dengan persentasi 11,42 persen.

“Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius, penting untuk memetakan situasi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan penyelenggaraan penghormatan hak-hak disabilitas,” ujarnya.

Yusharto optimistis, dengan kerja sama berbagai pihak dapat membawa hasil positif terkait upaya pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas, baik itu pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, pengembangan kompetensi wawasan dan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan maupun kesempatan kerja.

“Kami berkomitmen mendukung pemilu yang aksesibel, non diskriminatif dan inklusif termasuk dalam kegiatan lainnya baik pendidikan, pekerjaan maupun akses layanan kesehatan yang ramah penyandang disabilitas,” terangnya.

●RDO





“Sampai hari ini Presiden belum melakukan itu (evaluasi), belum menetapkan bahwa ada menteri yang melalaikan tugas karena masalah Pemilu”

Ma'ruf Amin

INFO

EKSEKUTIF

21

Minggu II • Agustus 2023

FOKUS EDUKASI PEMILIH PEMULA

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan Tengah memfokuskan edukasi kepada para pemilih pemula agar bisa memahami lebih baik makna Pemilihan Umum yang damai menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengatakan, edukasi politik yang positif itu diperlukan oleh generasi Z yang menjadi pemilih pemula agar mereka mendapatkan pemahaman yang benar di tengah banjir arus informasi di media sosial dan platform digital.

“Di pemilu 2024 ini lebih dari 70 persen pemilih adalah pemilih muda. Ini yang paling penting, bagaimana kita mengomunikasikan, bagaimana kita mensosialisasikan makna Pemilu Damai itu,” kata Nezar.

Menurut Nezar, edukasi politik dari sisi pemerintah untuk memberikan sisi netral kepada pemilih pemula menjadi penting karena saat ini generasi Z bisa mendapatkan banyak pandangan mengenai isu politik lewat berbagai konten media sosial yang dipublikasikan tanpa ada batasan yang jelas.

Agar para pemilih pemula itu tidak salah langkah dan tidak terjebak oleh informasi sesat, maka Nezar menilai dibutuhkan peran Kemenkominfo untuk memberikan edukasi politik yang benar.

“Mereka melihat konten-konten dan ada yang kena hoaks dan lain sebagai-

nya. Ini mungkin perlu juga edukasi politik buat generasi muda ini,” ujar Nezar.

Dalam narasi Pemilu Damai yang diusung Pemerintah di Pemilu 2024, Kemenkominfo ingin pemilih pemula tidak terjebak dengan narasi politik yang memiliki muatan memecah belah maupun berisi ujaran kebencian. Narasi Pemilu Damai harus dis-



ebarkan dan dipahami generasi Z mengingat pada Pemilu yang lalu, yakni Pemilu 2019, kondisi serupa hampir terjadi.

“Politik identitas bisa membuat Indonesia nyaris menjadi divided nation (negara yang terpecah). Saya kira pengalaman itu menjadi bekal buat kita dalam menghadapi pemilu 2024,” kata Nezar.

Dengan edukasi kepada para pemilih pemula, Pemilu 2024 diharapkan dapat menciptakan kultur baru bagi politik Indonesia. Generasi muda yang menjadi pemilih pemula disiapkan untuk aktif berpartisipasi tanpa perlu terseret informasi yang bisa memecah belah bangsa.

“Kultur yang sehat yang kita hasilkan dari politik Indonesia di 2024 akan menentukan langkah dan masa depan kita di 2045. Saya kira itu menjadi tanggung

jawab semuanya,” kata Nezar.

Pakar politik dari Universitas Halu Oleo, Najib Husain, mengatakan, pemilih pemula berpotensi bermata dua. Artinya, kondisi pemilih pemula yang masih labil atau awam dari perpolitikan bisa cenderung dimobilisasi oleh oknum tertentu untuk tujuan politik semu. Sebaliknya, jika KPU maksimal mengedukasi pemilih pemula dengan baik, maka kekhawatiran menjadi pemilih pragmatis bisa terendus.

“Proses edukasi yang benar-benar menyetuh dan membangkitkan kesadaran pemilih pemula menjadi perihal esensial atau fokus utama. Mereduksi hal-hal yang dapat menjeremuskan pemilih pemula dari politik kotor yang dapat mencederai kredibilitas Pemilu,” kata Najib Husain.

Dia menjelaskan, konsepsi edukasi terhadap pemilih pemula mesti berbasis jangka panjang. Tidak berbasis proyek atau hanya menggugurkan kewajiban. Pada titik ini, KPU harus meramu sistem pendidikan sosialisasi kepada pemilih pemula dengan metode mendalam, menyeluruh serta paripurna.

Bagi Najib Husain, celah sekecil apapun yang berpotensi sebagai jalan terjerumusnya pemilih pemula pada kondisi politik pragmatis, wajib ditutup rapat. Ketika misi tersebut benar-benar terealisasi dengan baik, output-nya dapat tercipta pelaksanaan pemilih yang demokratis. Nilai tambahnya, KPU bisa terkategori berhasil memberdayakan pemilih pemula dengan baik.

“Pemilih pemula dalam kondisi rentan. Belajar dari pemilihan sebelumnya, tak sedikit pemilih pemula mudah dimobilisasi hanya dengan iming-iming finansial dengan jumlah tertentu,” jelas doktor alumni Universitas Gajah Mada (UGM) itu. ●

Menteri Jangan Lalai Tugas

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan menteri Kabinet Indonesia Maju untuk fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, menteri yang lalai karena lebih fokus mengurus masalah Pemilu maupun Pileg 2024 akan dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo.

“Presiden sudah menyatakan begitu kalau ada menteri yang melalaikan tugasnya, nanti akan dievaluasi,” ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya di sela kunjungan kerja ke Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis, 3 Agustus 2023.

Meski begitu, hingga saat ini, kata Kiai Ma'ruf, belum ada menteri yang dievaluasi karena lalai melaksanakan tugas.

“Sampai hari ini Presiden belum melakukan itu (evaluasi), belum menetapkan bahwa ada menteri yang melalaikan tugas karena masalah Pemilu,” ujar Kiai Ma'ruf.

Namun, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mewantiwanti agar pesan ini menjadi pengingat para menteri agar tidak terfokus pada urusan pemilu.

“Kita belum tahu besok lusa, sampai hari

ini memang belum. Dan memang belum mulai kan, baru warming up saja, ini belum mulai. Oleh karena itu tunggu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan para menterinya maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 mendatang. Namun, Jokowi mengingatkan agar pencalonan ini tidak mengganggu tugas dan kinerja di pemerintahan saat ini.

Jokowi juga menegaskan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Jika pencalonan tersebut mengganggu kinerja para menterinya, maka ia tak segan-segan untuk menggantinya.

Kiai Ma'ruf juga merespons adanya pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MK sebagai lembaga yang berwenang menguji UU.

“Saya kira kita sudah punya lembaganya untuk mempertimbangkan dan membicarakan itu, itu Mahkamah Konstitusi,” ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf juga meyakini MK mempunyai pertimbangan terkait batas usia calon capres dan cawapres yang tepat sesuai konstitusi. “Kalau saya serahkan nanti kepada MK mempertimbangkan baik dan buruknya, ya, apakah mempertahankan di atas 40 atau misalnya membolehkan sampai ke umur 35,” ujarnya.

Karena itu, apa pun putusan MK nantinya, pemerintah akan mengikuti ketentuan tersebut. Sebab, putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres adalah final dan mengikat. “Kalau memang misalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan tetap atau berubah, saya kira pemerintah hanya bisa mengikuti keputusan, karena Keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding, mengikat,” ujarnya. ●



“Hanya sebuah permainan politik yang sudah sering terjadi dan gamblang sekali terbaca”



Bagindo Togar Butar-Butar

HERMAN DERU UTAMAKAN KELUARGA TOLAK INSTRUKSI SURYA PALOH

Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Ketua DPW NasDem Sumsel, Herman Deru, menolak instruksi Surya Paloh agar dirinya maju sebagai calon anggota legislatif pada Pileg 2024. Gubernur Sumsel tersebut menolak karena tidak ingin bertarung dengan anak dan menantunya yang dicalonkan Partai NasDem.

Menantu Herman Deru yang kini Tengah dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Sumsel dari Fraksi PAN, Muhammad Yaser, diketahui akan maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Sumsel I. Sementara putrinya, Samantha Tivani, maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Sumsel II.

Sebelumnya, instruksi dari Surya Paloh agar Herman Deru maju sebagai caleg DPR RI disampaikan Koordinator Wilayah Sumatera III DPP Partai NasDem, Fauzi H Amro. Hal itu mengingat jabatan Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel akan berakhir pada 1 Oktober 2023.

“Kami berharap Pak Gubernur kebetulan Ketua DPW akan berakhir jabatan 1 Oktober, dan Pilkada dilaksanakan November 2024. Jadi, kurang lebih hampir satu tahun lebih Pak Gubernur tidak bisa beraktivitas sebagai gubernur. Nah, dia Ketua DPW saran Ketum (Surya Paloh) wajib mencalonkan diri di DPR RI Sumsel II,” kata Fauzi.

Surya Paloh meminta Herman Deru untuk mencalonkan diri di Pileg 2024 lantaran ingin mengejar target lima kursi DPR RI dari Sumatera Selatan. Rinciannya, tiga kursi dari wilayah Dapil Sumsel II dan dua kursi dari Dapil Sumsel I. Hal itu dinilai membuat Herman Deru seakan-akan mengagalkan target tersebut.

Menolak perintah Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai NasDem bisa saja berdampak kepada Herman Deru secara nyata ke depannya.

Pengamat politik asal Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar, menyebut ada tiga kemungkinan yang bisa didapatkan oleh Herman Deru atas keputusannya menolak instruksi Surya Paloh.

Pertama, Herman Deru bisa saja dikeluarkan dari Partai NasDem karena menolak perintah langsung ketua umum. Terlebih, target partai adalah sesuatu yang harus dicapai dan menjadi tanggung jawab Herman Deru sebagai Ketua DPW Partai NasDem Sumsel.

Jika dinilai tidak bisa memegang

tanggung jawab dalam menjalankan instruksi Ketua Umum Partai NasDem, dikeluarkan dari partai adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam politik.

Kedua, pelanggaran menjalankan instruksi partai tentunya secara organisasi akan ada dampak, termasuk berupa sanksi. Ada kemungkinan Herman Deru mendapatkan sanksi karena tidak menjalankan perintah langsung Surya Paloh.

Agenda-agenda besar Partai NasDem harus ditegakkan dengan sanksi untuk menertibkan sesuatu yang menghalangi jalannya roda organisasi.

Ketiga, selain sanksi organisasi, pelanggaran yang dilakukan juga bisa berdampak dengan mendapatkan sanksi sosial. Salah satunya dikucilkan oleh para kader karena dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan mereka. Kader partai selalu menjalankan kebijakan organisasi dan akan menghindari kader lain yang bermasalah tentang kondisi tersebut.

Menurut Togar, beragam dampak buruk kemungkinan bisa saja terjadi kepada Herman Deru, namun dengan catatan besar apabila itu keputusan kolektif dari Partai NasDem.

“Sanksi bisa didapatkan kalau benar itu keputusan kolektif partai. Karena instruksi yang diberikan Surya Paloh saya rasa tidak melanggar organisasi karena keputusan pribadi seorang SP. Berbeda kalau keputusan itu sudah disepakati secara organisasi dan berdasarkan kolektif Par-

tai,” kata Togar.

Togar menuturkan, meski secara organisasi Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai NasDem, namun intruksinya tidak juga menggambarkan sebuah organisasi partai apabila tidak dijalankan berdampak pelanggaran berat.

“Karena itu tadi keputusan itu bukan keputusan kolektif partai, tadi saya bilang hanya sebagai pribadi seorang SP yang ingin Ketua DPW ikut maju DPR RI,” ucapnya.

Dia yakin persoalan ini tidak akan melebar sampai kepada kemungkinan-kemungkinan pemberhentian, sanksi dan dikucilkan oleh kader. Sebab, persoalan ini bisa diselesaikan secara tenang dan santai.

Hal itu disebutnya sudah di luar koridor prinsip yang besar karena keputusan itu baru disampaikan oleh Surya Paloh secara pribadi. Surya Paloh mungkin hanya mengutarakan keinginan pribadi dan bisa saja tidak sebagai ketua umum. Sebab, target Partai NasDem yang tinggi untuk meraih kursi hingga keinginan pribadi tertuangkan.

“Saya rasa persoalannya nanti biasa saja tidak sampai ada sanksi dan sebagainya. Karena akan diselesaikan oleh pihak DPP dan DPW Sumsel untuk mendapatkan solusi terbaiknya,” ujarnya.

Pandangan sebaliknya justru disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Febrian. Dia menyebut, sepanjang pengamatannya, Partai NasDem tidak akan memberikan sanksi terhadap persoalan seperti itu.

“Kalau ada pelanggaran yang seperti itu, PDIP mungkin akan memberikan sanksi tegas. Tetapi NasDem tidak seperti itu, saya rasa hanya akan ada pembahasan lagi secara internal. Terkecuali

kalau ada kader yang bermasalah soal hukum Surya Paloh sendiri berkata dia yang akan siap mundur,” jelasnya

Diakuinya ada kemungkinan luar biasa apabila Herman Deru menolak instruksi dari ketua umum karena dia juga tidak ingin mencalonkan periode kedua Gubernur Sumsel. Hal itu disebutnya karena Herman Deru sampai saat ini belum menyatakan secara resmi akan maju ke periode kedua.

“Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Namun, bisa saja keputusan menolak karena ada keputusan luar biasa tadi. Sebab HD juga tidak mau maju ke prode kedua,” terangnya.

Lima Kursi DPR Sumsel

Pengamat politik asal Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar, menyatakan, Gubernur Sumsel yang juga Ketua DPW Partai NasDem Sumsel, Herman Deru, tidak mungkin menolak instruksi Surya Paloh. Hal itu karena target Partai NasDem jelas mengejar lima kursi DPR RI dari Sumsel.

“Ini hanya naskah politik saja, tidak mungkin HD menolak, kalau menolak instruksi itu tentunya rugi. Karena NasDem memiliki target lima kursi DPR RI dari Sumsel,” kata dia

Menurutnya, naskah politik yang akan dimainkan Herman Deru adalah menerima karena membutuhkan banyak suara. Selanjutnya orang yang di bawahnya bisa menggantikan posisi HD. Karena yang terpenting adalah target kursi DPR RI dari Sumsel bisa berjalan.

“Hanya sebuah permainan politik yang sudah sering terjadi dan gamblang sekali terbaca,” terangnya.

Togar menyampaikan alasan Herman Deru menolak instruksi Surya Paloh tak masuk akal hanya karena tidak ingin bersaing dengan keluarganya. HD tak ingin bersaing dengan anak dan menantunya yang lebih dulu mempersiapkan diri dalam pertarungan di Pileg 2024.

“Karena bisa saja anak dan menantunya ada di bawah setelah itu posisinya digantikan. Artinya itu bukan menjadi alasan,” ucapnya.

Menurutnya, alasan penolakan Herman Deru karena dia ingin kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel. Hal itu tentunya tidak berdampak kepada target lima kursi DPR. Karena target itu hanya harus dicapai dan ke depannya bisa dilakukan pergantian.

Dia menyebut, selain Herman Deru, Partai NasDem juga meminta enam kepala daerah di Sumsel untuk turut mencalonkan diri di Pileg 2024. Artinya target harus dicapai demi mendapatkan suara tersebut. Turunnya para ketua Partai NasDem, khususnya Herman Deru, disinyalir akan berdampak para kader yang semangat untuk meraih target tersebut. ●





“Dapil Jakarta III itu juga kan lebih banyak diisi oleh pemilih yang rasional. Jadi, hampir pasti orang yang memang punya kapasitas, itu yang terpilih”

Lucius Karus

PERTARUNGAN DAPIL NERAKA JAKARTA III

Calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024 yang akan bertarung memperebutkan 580 kursi DPR, di antaranya ada yang bakal berkompetisi di daerah pemilihan (dapil) “neraka”.

Salah satu yang kerap disebut dapil neraka adalah dapil Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Pertarungan ketat di Dapil Jakarta III bakal ketat karena diisi kandidat dengan nama-nama beken dan petahana.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, di Jakarta Utara ada 1.345.136 pemilih dan 4.853 tempat pemungutan suara (TPS). Jakarta Barat terdapat 1.905.352 pemilih dan 7.169 TPS. Sedangkan, Kepulauan Seribu ada 22.036 pemilih dan 88 TPS.

Pada Pileg 2019, ada delapan anggota DPR yang lolos dari dapil tersebut, antara lain Adang Daradjatun (PKS), Darmadi Duriyanto (PDI-P), Chales Honoris (PDI-P), Kamrussamad (Partai Gerindra), Ahmad Sahroni (Partai NasDem), Lulung AL (PAN), Effendi MS Simbolon (PDI-P), dan Santoso (Partai Demokrat).

Pertarungan caleg DPR di dapil Jakarta III tampaknya bakal seru lantaran selain akan diisi nama-nama lama yang sudah punya basis massa, juga menghadirkan nama baru yang punya popularitas. Salah satunya pentolan grup musik Ungu, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu yang akan maju dengan PAN.

Adang Daradjatun lolos tiga kali sebagai anggota DPR dari dapil Jakarta III sejak Pileg 2009. Menurut Adang, kunci keberhasilannya selalu lolos ke Senayan adalah menjaga intensitas bertemu dengan masyarakat. Ia mengaku, kerap meluangkan waktu menemui konstituennya di dapil Jakarta III.

Selain menyerap aspirasi, dia memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik sangat penting karena masih ada masyarakat yang apatis, menganggap memilih wakil di parlemen tidak ada manfaatnya.

Anggota Komisi III DPR fraksi PKS itu mencontohkan, salah satu aspirasi warga yang betul diperjuangkannya, yakni menemukan bandar narkoba, saat mengunjungi Jakarta Utara.

“Lalu, saya lapor ke polres untuk segera ditindak. Besoknya ternyata daerah itu mulai aman. Ada lagi soal pembangunan di

daerah dapil saya, perbaikan jalan. Tiba-tiba ledeng airnya tergaruk oleh proyek, sehingga mati. Akhirnya saya bicara dengan anggota DPRD DKI (Jakarta) untuk dibantu,” kata Adang.

Adang menuturkan, tak pernah menjanjikan apa-apa kepada masyarakat, termasuk uang. “Masyarakat itu masih memiliki harga diri. Masih memiliki keinginan yang baik, dalam arti dia akan memilih orang-orang yang betul-betul dekat dengan dia,” katanya.

Jalan Adang menjadi anggota DPR kembali tak mudah. Memasuki musim pemilu, Adang mengaku mendapat “serangan” secara tak langsung, berupa isu miring terkait latar belakangnya sebagai pensiunan anggota Polri.

Caleg lain yang rencananya maju di dapil Jakarta III adalah Surya Tjanda. Ia bakal maju dalam Pileg 2024 bersama Partai NasDem. Sebelumnya, Surya adalah kader PSI. Ia pernah menjadi caleg pada Pileg 2019 di dapil Jawa Timur V, meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Belum lama ini, ia mengaku mulai turun ke wilayah dapil Jakarta III, misalnya mengunjungi masyarakat di Kampung Bayam, yang sebagian masih bermukim dengan tenda dekat Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Warga Kampung Bayam,

kata Surya, seharusnya dapat rusun yang sudah dibangun pemerintah daerah. Namun, sampai sekarang mereka belum mendapat fasilitas itu.

“Dan yang saya lihat, mereka sangat menghargai kalau diajak diskusi. Jadi, ya, dalam kampanye ini, saya belajar langsung saja ke kasus-kasus yang dihadapi (masyarakat),” kata Surya.

Surya pun berencana keliling kantong-kantong kawasan kumuh di dapil Jakarta III. Ia menganggap, kawasan kumuh jarang dikunjungi caleg atau anggota DPR.

“Jadi, satu hal yang membuat saya penting, memang masyarakat sebetulnya mau dipindahkan ke tempat yang lebih layak, tapi butuh diajak ngobrol, berdialog,” ucap mantan Wakil Menteri ATR/BPN tersebut.

Ia bakal kerap datang langsung ke lapangan agar dikenal pemilih. Terlebih, ia mengaku sudah punya pengalaman di beberapa lokasi dapilnya, yang didominasi industri.

“Dulu di lembaga perburuhan yang saya pimpin, ada program pemberdayaan di masyarakat, pekerja perumahan. Itu di Penjarangan sudah lama,” ujarnya.

Terkait pekerja perumahan, menurutnya, salah satu aspirasi yang belum terealisasi adalah payung

hukum. Surya juga menaruh perhatian di kawasan pesisir, yang menjadi salah satu kantong kemiskinan—termasuk Kepulauan Seribu.

“Di sana (Kepulauan Seribu) kan ada beberapa kasus (sengketa) pulau. Saya pernah dapat kasus itu waktu jadi wamen (ATR/BPN), tapi enggak pernah ketemu warganya langsung,” ucap Surya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut, lokasinya yang berada di ibu kota menjadikan dapil Jakarta III menarik. Status ini biasanya membuat partai-partai politik saling intip untuk mengetahui kader yang dijagokan. Hal itu membuat dapil Jakarta III diisi para ujung tombak partai politik dan kader yang potensial meraup suara.

“Dapil Jakarta III itu juga kan lebih banyak diisi oleh pemilih yang rasional. Jadi, hampir pasti orang yang memang punya kapasitas, itu yang terpilih,” kata Lucius.

Latar belakang publik figur terkenal, kata Lucius, belum tentu bisa menang di dapil Jakarta III. Berkaca pada Pileg 2019 di dapil tersebut, caleg yang tak lolos ke DPR bukan tanpa popularitas dan suara yang tinggi.

Dia mencontohkan Grace Natalie yang memperoleh 179.949 suara di dapil Jakarta III pada Pileg 2019. Namun, ia gagal ke parlemen karena suara nasional PSI tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Lucius berpendapat, tiga kursi yang diperoleh kader PDIP saat Pileg 2019 di dapil Jakarta III bisa jadi karena banyak pemilih dari etnis Tionghoa. Hal itu menguntungkan PDIP yang membawa isu nasionalis, plus efek ekor jas dari Joko Widodo.

Ketika petahana DPR kembali maju di dapil Jakarta III pada Pileg 2024, Lucius mengatakan, peluang menang bagi caleg baru akan tergantung pada kapasitasnya. Tidak sekadar menjual popularitas semata.

“Dan jangan lupa juga saya kira, sangat ditentukan siapa calon presiden yang nanti akan didukung partai-partai besar. Itu akan menentukan ke mana suara pemilih di pemilihan legislatif,” ujarnya.

Peluang pendatang baru untuk menang, bisa jadi menipis karena petahana di dapil Jakarta III merupakan orang-orang yang sudah memiliki basis massa. Selain Adang dari PKS, ada tiga kader PDI-P yang duduk di DPR, yakni Darmadi Duriyanto, Charles Honoris, dan Effendi MS Simbolon.

“Mereka kan orang lama sekali. Orang-orang yang sudah paham peta. Ditambah lagi kalau calon presiden PDIP disukai kaum nasionalis yang ada di dapil Jakarta III, itu memberikan banyak keuntungan bagi caleg-caleg dari PDI-P atau partai nasionalis lain,” tutur Lucius. ●



“Jika dilihat dari survei sejak Januari, Mei, Juni dan Juli 2023, bisa terlihat tren elektabilitas Prabowo menanjak dan Ganjar turun-naik”

Hanggoro Doso Pamungkas



PRABOWO TINGGALKAN GANJAR ANIES NGGAK MASUK HITUNGAN

Jarak elektabilitas antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, enam bulan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin lebar. LSI Denny JA mencatat, kedua calon presiden (capres) tersebut berjarak sebesar 10,4 persen.

Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA periode Juli 2023, elektabilitas Prabowo Subianto tercatat sebesar 52 persen, sedangkan Ganjar Pranowo 41,6 persen.

Menurut Direktur CPI-LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, jika dilihat dari survei sejak Januari, Mei, Juni dan Juli 2023, bisa terlihat tren elektabilitas Prabowo menanjak dan Ganjar turun-naik.

Selisih elektabilitas secara head-to-head antara Prabowo vs Ganjar juga semakin melebar. Pada Januari 2023, Ganjar unggul atas Prabowo dengan selisih elektabilitas 4,6 persen.

“Sejak Mei 2023, keunggulan berbalik menjadi milik Prabowo dengan selisih 6,4 persen, Juni naik menjadi 7,2, dan Juli selisih semakin melebar menjadi 10,4 persen,” ujar Hanggoro dalam rilis terbarunya, Senin, 31 Juli 2023.

Selain itu, survei yang sama juga mengemukakan soal distribusi Prabowo dan Ganjar di berbagai segmen pemilih. Di kalangan pendukung partai, Survei LSI Denny JA menemukan bahwa Prabowo unggul di pemilih Partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PPP dan partai lainnya.

Dari sisi penganut agama, Prabowo unggul di pemilih Islam dengan dukungan sebesar 54,7 persen dan Ganjar sebesar 38,9 persen. Pada penganut agama non-Islam, Ganjar unggul dengan dukungan sebesar 62,6 persen dan Prabowo sebesar 30,9 persen.

Dari sisi gender, Prabowo unggul di pemilih laki-laki maupun perempuan. Di pemilih laki-laki, dukungan terhadap Prabowo sebesar 53,0 persen, sementara Ganjar 41,7 persen. Di Pemilih perempuan, dukungan terhadap

Prabowo sebesar 51,1 persen dan Ganjar 41,5 persen.

Selain itu, dari lima provinsi terbesar, Prabowo unggul di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sementara, Ganjar unggul di dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Di Pulau Jawa yang meliputi semua provinsi, Ganjar unggul atas Prabowo sebesar 0,1 persen. Dukungan terhadap Ganjar sebesar 45,7 persen, sedangkan Prabowo 45,6 persen. Di Pulau Sumatera, Prabowo unggul atas Ganjar dengan dukungan sebesar 53,3 persen dan Ganjar 40,0 persen.

Di Indonesia bagian tengah yang meliputi semua provinsi yang ada di Kalimantan dan Sulawesi, Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih sebesar 50,6 persen. Dukungan terhadap Prabowo sebesar 75,2 persen dan Ganjar 24,6 persen.

Di Bali-Nusa Tenggara, Prabowo unggul dengan dukungan 56,2 persen, sedangkan Ganjar 37,9 persen. Sementara, di Indonesia Timur yang meliputi semua provinsi yang ada di Maluku dan Papua, Ganjar unggul dengan dukungan 50,6 persen dan Prabowo 42,8 persen.

Hanggoro menerangkan, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan jarak elektabilitas Prabowo dan Ganjar melebar. Pertama, empat blunder Ganjar dan Megawati. Kedua, dua gerakan cantik Prabowo.

“Mengapa disebut blunder? Dalam riset ini, blunder diistilahkan untuk tindakan yang mengurangi tingkat elektabilitas capres. Sedangkan, langkah cantik untuk manuver yang menambah elektabilitas capres,” ungkapnya.

Blunder pertama yang dilakukan Ganjar adalah terkait wawancara Ganjar dengan Deddy Corbuzier yang menyatakan apa salahnya menonton video porno selaku orang dewasa. Hal itu kemudian segera

menyebarkan dan viral menjelang Pilpres 2024, meski itu adalah video lama yang diangkat kembali.

Publik yang menyatakan kurang wajar/tidak wajar sama sekali terhadap capres yang suka menonton video porno mencapai 86,1 persen. Ketidaksukaan publik terhadap video porno, selain karena alasan agama, bisa juga disebabkan karena banyak berita ahli yang menyatakan menonton video porno merusak kesehatan.

“Publik terlanjur mempercayai pernyataannya Ganjar yang menyatakan ia suka menonton film porno. Soal Ganjar mengaku menonton video porno, bahkan kini dijadikan sayembara nasional. Wanita Perisai sebagai pemrakarsa sayembara nasional ini menyatakan bahwa isu menonton pornografi jangan dianggap sepele,” terangnya.

Blunder kedua terhadap Ganjar adalah label petugas partai yang disematkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati berulang-ulang mengatakannya ke publik, di mana dulu dia mengatakannya itu untuk Presiden Jokowi.

Di satu sisi, istilah petugas partai itu separuh benar. Capres memang tokoh yang ditugaskan oleh partai. Tapi jika sudah menjadi presiden lalu masih dipersepsikan sebagai petugas partai, ini memberi kesan

partai politik lebih tinggi dibandingkan lembaga presiden. Atau seorang presiden seolah bawahan atau petugas dari ketua umum partai yang mencalonkannya.

Adapun publik yang tidak

suka dan tidak setuju dengan istilah presiden petugas partai mencapai 69,9 persen.

Blunder ketiga yang dilakukan Ganjar adalah terkait batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ganjar dipersepsikan ikut membuat batal Piala Dunia U-20 dan menjadi tokoh paling tinggi yang disalahkan. Sebesar 16,6 persen menyalahkan Ganjar.

Beberapa pihak sebenarnya sudah mengklarifikasi. Batalnya Piala Dunia U 20 tak berhubungan dengan ketidaksetujuan Ganjar atau tokoh PDIP lainnya. FIFA memiliki alasan berbeda. Namun, opini publik terbentuk yang merugikan Ganjar Pranowo.

Blunder keempat yakni Ganjar dianggap cawe-cawe menegur Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ganjar dianggap berlagak seperti Presiden ketika ia menelepon Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan keluhan pedagang Pasar Warakas, Tanjung Priok.

Mayoritas publik menganggap Ganjar, sebagai sesama gubernur, tak seharusnya menyampaikan keluhan ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 74,7 persen menganggap Ganjar tak pantas menyampaikan keluhan itu.

Di sisi lain, langkah cantik yang dilakukan Prabowo ikut memperlebar elektabilitas dengan Ganjar.

Pertama, Prabowo dan Presiden Jokowi terlihat semakin akrab. Hal ini membentuk pikiran publik bahwa dukungan Presiden Jokowi mengarah ke Prabowo di Pilpres 2024.

“Ini masa di mana Jokowi masih populer. Ibarat pepatah menyatakan, jika kita dekat dengan bau harum, kita akan ikut harum,” tambah Hanggoro.

Data survei juga memperlihatkan pergeseran pemilih yang puas terhadap Jokowi dari Ganjar ke Prabowo. Pada Januari dan Maret 2023, Ganjar unggul di pemilih yang puas terhadap Jokowi. Namun, di Juni dan Juli 2023, Prabowo unggul di pemilih yang puas terhadap Jokowi.

Kedua, sosialisasi Prabowo soal komitmennya untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Dalam banyak kesempatan, Prabowo menyebutkan lima program ekonomi rakyat yang akan ia perjuangkan. Selain itu, para relawannya ikut menyebarkan billboard “Prabowo: Tegas, Sejahterakan Rakyat” di banyak kabupaten.

Isu yang diangkat Prabowo juga sesuai dengan harapan publik. Lima Program Ekonomi Rakyat, yakni terjangkau hingga gratis untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, sembako, dan pinjaman dana usaha disukai sebanyak 83,5 persen publik. Ada juga yang tidak menyukai program ini, tetapi angkanya sangat kecil, yakni 1,1 persen.

• RDO

